

Revisi
Rencana Induk
Teknologi Informasi dan Komunikasi
Kabupaten Maros
Tahun 2016-2020



Pemerintah Kabupaten Maros
Kantor Komunikasi dan Informatika
T.A. 2015

Kata Pengantar

Era reformasi saat ini menuntut terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dimana masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif.

Pemerintah Kabupaten Maros mau tidak mau harus memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan, dan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik. Melalui Visi dan misinya, Pemerintah Kabupaten Maros sedang melaksanakan proses transformasi menuju tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-Government) yang menuntut adanya perubahan-perubahan yang inovatif. Melalui proses tersebut, diharapkan dapat mengoptimasikan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi dan birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan satuan kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Maros bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan.

Pemerintah pusat mengharapkan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di daerah menjadi lebih terarah dan terintegrasi. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Maros telah menyusun rencana induk pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) beserta rekomendasi pengembangannya yang bertujuan agar kebijakan pengembangan e-Government dapat dilaksanakan secara sistematis dan terpadu.

Dokumen Rencana Induk TIK (RITIK) tahun 2016 – 2020 ini diharapkan dapat membantu setiap satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros dalam mengembangkan dan mengimplementasikan e-Government, sebagai bagian dari kebijakan dan strategi pemerintah guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dokumen ini perlu di tinjau ulang secara berkala untuk memastikan perencanaan ini dilaksanakan dengan baik dan disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi wilayah Kabupaten Maros serta perkembangan teknologi dimasa yang akan datang.

Penyusun

Executive Summary

Kabupaten Maros sebagai daerah yang terus mengalami pertumbuhan mau tidak mau pemerintahnya harus menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman dan harapan masyarakat untuk menjadikan pemerintahnya sebagai pemerintahan yang *Smart Government*, artinya pemerintah yang cerdas dalam membangun layanannya pada masyarakat. Permasalahan kebijakan e-Government di Pemerintah Daerah Kabupaten Maros adalah masih kurangnya regulasi yang mengatur tatakelola e-Government sehingga para pengambil kebijakan sulit melakukan pengambilan kebijakannya sedangkan di level pelaksana di setiap SKPD tidak mempunyai pedoman yang jelas untuk mengembangkan dan memanfaatkan TIK dengan baik dan benar, untuk itu SKPD Kominfo sebagai *leading sector* dalam implementasi e- Government harus segera melengkapi semua kekurangan regulasi tersebut.

Kelemahan di kelembagaan pemerintah daerah lebih pada kurang optimalnya posisi unit kerja Kominfo yang selain posisinya kurang setara dengan pengambil kebijakan yang bisa dengan mudah ditaati oleh semua SKPD, ditambah dengan beban mengurus permasalahan di luar sektor TIK. SDM yang ada masih kurang banyak dan kompeten sehingga beban kerja TIK yang sedemikian banyak terasa tidak mampu tertangani dengan optimal.

Aplikasi e-Government sudah cukup banyak dibangun oleh SKPD Kominfo dan SKPD yang merasa betapa sangat penting dan mendesak untuk segera diimplementasikannya otomatisasi layanan pemerintah. Infrastruktur TIK di Pemda Maros sudah sangat bagus, kedepan perlu ditingkatkan di permasalahan keamanan informasi, hal ini untuk segera mengimplementasikan UU keamanan nasional yang amanahnya yaitu pengamanan

data/informasi milik pemerintah. Keamanan informasi sangat membutuhkan *effort* yang besar dan mengurangi kenyamanan.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Executive Summary	iii
Daftar Isi	v
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran.....	4
1.3. Ruang Lingkup Dokumen Perencanaan	6
1.4. Metodologi	6
1.5. Dasar Hukum Pelaksanaan.....	12
BAB II Kerangka Pemikiran.....	14
2.1. e-Government Framework	14
2.2. Tujuan e-Government.....	15
2.2.1. Layanan e-Government.....	16
2.2.2. Layanan Infrastruktur	16
2.2.3. Layanan Aplikasi	17
BAB III Kondisi Terkini	21
3.1. Hasil Tinjauan.....	21
3.1.1. Kebijakan TIK	21
3.1.2. Kelembagaan.....	23
3.1.3. Aplikasi.....	36

3.1.4.	Infrastruktur.....	37
3.1.5.	Perencanaan.....	37
3.2.	Penghargaan Nasional	38
BAB IV	Analisis	40
4.1.	Analisis Resiko	40
4.1.1.	Kebijakan.....	40
4.1.2.	Kelembagaan.....	41
4.1.3.	Aplikasi.....	42
4.1.4.	Infrastruktur.....	43
4.1.5.	Perencanaan.....	43
4.2.	Analisis SWOT.....	45
4.3.	Analisis Strategik.....	47
BAB V	Perencanaan Strategis	49
5.1.	Faktor-Faktor Penentu Kesuksesan.....	49
5.1.1.	Visi, objektif dan strategi.....	49
5.1.2.	Hukum dan Peraturan	50
5.1.3.	Struktur Organisasi.....	50
5.1.4.	Proses Bisnis.....	51
5.1.5.	Teknologi Informasi.....	51
5.2.	Visi dan Misi Pengembangan TIK	52
5.2.1.	Visi	52
5.2.2.	Misi.....	52

5.3.	Tujuan dan Sasaran.....	52
5.4.	Analisis SWOT untuk Perencanaan Strategis.....	55
5.5.	Analisis Strategi dan Kebijakan	58
5.6.	Kebijakan e-Government	60
5.6.1.	Dimensi Kebijakan.....	60
5.6.2.	Dimensi Kelembagaan.....	60
5.6.3.	Dimensi Infrastruktur	61
5.6.4.	Dimensi Aplikasi	61
5.6.5.	Dimensi Perencanaan	62
BAB VI	Program, Kegiatan dan Rekomendasi	64
6.1.	Penetapan Skala Prioritas	64
6.2.	Tahapan Implementasi	71
6.3.	Rekomendasi Kebijakan	73
6.4.	Rekomendasi Kelembagaan	74
6.4.1.	Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi.....	74
6.4.2.	SKPD Pengelola TIK	77
6.4.3.	Tugas Pokok dan Fungsi	78
6.4.4.	Kebutuhan SDM.....	78
6.5.	Rekomendasi Perencanaan.....	79
6.6.	Rekomendasi Aplikasi e-Government.....	80
6.6.1.	Status Aplikasi e-Government	80
6.6.2.	Spesifikasi website Pemda Maros dan sub domainnya	84

6.6.3. Skala Prioritas Pengembangan Aplikasi	86
6.6.4. Standardisasi Metadata.....	87
6.7. Rekomendasi Sarana Prasarana TIK.....	90
6.7.1. Jaringan Backbone	92
6.7.2. Sistem Pengamanan Data	93
6.7.3. Data Center/Data Recovery Center.....	96
BAB VII Penutup.....	99

BAB I

Pendahuluan

Pada bagian ini akan dijelaskan latar belakang penyusunan Rencana Induk TIK (RITIK) Kabupaten Maros, maksud, tujuan dan sasarannya, serta ruang lingkup kegiatan ini. Kemudian akan dijelaskan pula metodologi yang digunakan dalam penyusunan RITIK ini, serta dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan ini.

1.1. Latar Belakang

Era reformasi saat ini menuntut terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dimana masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif. Kemampuan untuk mengikuti perubahan akan meningkat sejalan dengan teknologi yang semakin mudah diakses. Para pelaku ekonomi dan masyarakat berharap untuk mendapatkan layanan pada waktu dan tempat yang sesuai dengan keinginan mereka. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governance* salah satu upayanya adalah menggunakan TIK atau yang populer disebut *e-Government*.

Dalam UU No. 32 tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan

memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Amanat UU ini menunjukkan bagaimana pentingnya efisiensi dan transparansi, sehingga e-government sangat sejalan dengan pengamalannya.

Pada abad ke-21 ini dimana informasi memegang peranan penting dari segenap kegiatan, apalagi bangsa kita akan memasuki era baru yang ditandai dengan keterbukaan dan persaingan bebas. Era baru itu, akan berpengaruh tidak saja di bidang ekonomi, tetapi juga dalam segi-segi kehidupan masyarakat yang lebih luas lagi. Untuk menghadapinya, pemerintah dituntut untuk membangun ketangguhan nasional di segala bidang. Tentunya, ketangguhan nasional itu hanya mungkin terwujud jika semua pelaku pembangunan mempunyai kesiapan yang dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih baik atau pelayanan prima menjadikan Pemerintah Kabupaten Maros mau tak mau harus mengikuti perkembangan teknologi yang menjanjikan efisiensi yang tinggi dan pelayanan yang lebih baik.

e-Government intinya adalah proses pemanfaatan TIK sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara efisien. Didalamnya ada dua hal utama yaitu penggunaan TI sebagai alat bantu dan pemanfaatannya menjadikan pelayanan pemerintahan berjalan lebih efisien. Dalam konsep e-government, masyarakat masih bisa berhubungan dengan pos-pos pelayanan, berbicara melalui telepon untuk mendapatkan pelayanan pemerintah, atau mengirim surat. Jadi, e-government sesuai dengan fungsinya, adalah penggunaan TIK yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain.

e-Government memberikan peluang baru untuk meningkatkan kualitas pemerintahan, dengan cara ditingkatkannya efisiensi, layanan-layanan baru, serta peningkatan partisipasi warga. Dengan demikian e-government akan meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik sebagai jalan untuk mewujudkan *good governance*. Melalui e-government, pelayanan pemerintah akan berlangsung secara transparan, dapat dilacak prosesnya, sehingga dapat dianggap akuntabel. Unsur penyimpangan dapat dihindarkan dan pelayanan dapat diberikan secara lebih efektif dan efisien.

Dikarenakan pentingnya peranan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka Pemerintah Republik Indonesia telah menyusun Rencana Induk strategis penerapan TIK untuk dunia pemerintahan melalui Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Rencana Induk dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.

Untuk mengantisipasi perkembangan jaman dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih efektif dan efisien serta mewujudkan pemerintah Kabupaten Maros sebagai *good governence*, Kabupaten Maros telah menyusun Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK) pada tahun 2012. Pada tahap pertama telah dilakukan survey kebutuhan dan kesiapan infrastruktur serta sumber daya manusia yang ada di instansi dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Maros. Sebagai tindak lanjut dari penyusunan RITIK tersebut maka pada tahun 2015 Kantor Kominfo Kabupaten Maros menyusun Revisi Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK) sebagai tindak lanjut dan penyempurnaan dari kegiatan sebelumnya.

Berdasarkan beberapa hal tersebut diatas, penyusunan dokumen Kebijakan pengembangan TIK dilaksanakan pada tahun ini oleh Kantor Kominfo Kabupaten Maros. Dimaksudkan untuk digunakan sebagai kerangka acuan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam upaya mengembangkan e-government di Pemerintah Kabupaten Maros, serta upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Adapun

ruang lingkup pengembangan dalam Dokumen Kebijakan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Kabupaten Maros ini terdiri dari 5 (lima) komponen pengembangan yaitu : Kebijakan, Kelembagaan, Aplikasi, Infrastruktur dan Perencanaan.

1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud penyusunan Dokumen Revisi Rencana Induk TIK Kabupaten Maros ini secara umum adalah untuk memberikan arahan yang nyata dan terukur serta realistis untuk dapat diselesaikan di setiap kegiatan di Kabupaten Maros yang menggunakan teknologi informasi. Selain itu penyusunan Revisi Rencana Induk TIK Kabupaten Maros ini dapat memberikan landasan berpikir, standarisasi, pentahapan dan implementasi bagi pengembangan TIK di lingkup Pemerintah Kabupaten Maros yang komprehensif, efisien, efektif dan terpadu menuju *Good Corporate Governance* dan tetap berada dalam kerangka dan bagian dari penerapan TIK di Kabupaten Maros.

Hasil yang diharapkan dengan adanya dokumen Revisi Rencana Induk TIK Kabupaten Maros ini adalah:

1. Sebuah Rencana Induk TIK yang dapat digunakan untuk mengontrol dan mengarahkan seluruh sumber daya TIK sehingga sesuai dengan strategi pengembangan daerah serta prioritasnya.
2. Tersedianya acuan untuk melaksanakan aktivitas di bidang pengembangan dan penerapan TIK yang sesuai dengan kondisi Kabupaten Maros saat ini dan 3-5 tahun kedepan.
3. Adanya langkah-langkah strategis, sinergis dan sistematis dalam pengembangan TIK khususnya pengembangan e-government guna menjadi dasar penyusunan kegiatan

dan penganggaran bidang TIK di Kabupaten Maros yang selalu mengacu pada dokumen ini.

Sedangkan tujuan penyusunan Revisi Rencana Induk TIK Kabupaten Maros adalah sebagai berikut :

1. Terciptanya kegiatan penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif sehingga menghasilkan sebuah layanan prima sesuai dengan visi pembangunan Kabupaten Maros.
2. Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang efektif dalam proses penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Maros.
3. Untuk menjamin keterpaduan sistem pengelolaan dan pengolahan data/dokumen dan informasi elektronik dalam rangka membuka akses informasi dan layanan Pemerintah Kabupaten Maros yang transparan.
4. Perbaiki organisasi, sistem manajemen, budgeting dan proses kerja pemerintahan.

Sedangkan sasaran dari kegiatan ini adalah :

1. Tersusunnya review terhadap berbagai rencana dan kebijakan terkait teknologi informasi dan komunikasi ataupun e-government yang telah ada.
2. Teridentifikasinya kondisi eksisting terkait pengembangan TIK di Kabupaten Maros dan merumuskan kebutuhannya.
3. Adanya rumusan rencana pengembangan TIK di Kabupaten Maros meliputi kerangka pemikiran dasar, cetak biru pengembangan, tahapan pengembangan, dan rencana implementasi.

1.3. Ruang Lingkup Dokumen Perencanaan

Adapun ruang lingkup pembahasan dalam dokumen rencana induk ini adalah :

1. Perencanaan Kebijakan dan Regulasi
2. Perencanaan Kelembagaan dan Organisasi
3. Perencanaan Data dan Aplikasi
4. Perencanaan Infrastruktur
5. Perencanaan keberlangsungan sistem

1.4. Metodologi

Metodologi pengembangan bersifat sistematis dan terarah untuk memperoleh hasil sesuai dengan rencana. Kunci utama keberhasilan metodologi terletak pada kemudahan integrasi dari reengineering dan optimalisasi kegiatan. Reengineering merupakan suatu perubahan proses bisnis menuju hal yang lebih efisien dan efektif. Optimalisasi menyangkut peningkatan efisiensi dan efektifitas dalam mengatur orang, uang, waktu, mesin dan sistem menuju hasil yang ingin dicapai.

Penggunaan suatu metodologi secara konsisten akan membuahkan beberapa hal utama, yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas dari hasil yang ingin dicapai;
- b. Meningkatkan efisiensi;
- c. Meningkatkan produktivitas;
- d. Meningkatkan jangka waktu pencapaian target;
- e. Membantu kegiatan awal menjadi lebih terarah;
- f. Membantu kelancaran tahap implementasi;
- g. Mewujudkan kesepakatan akan standar dan tolak ukur yang digunakan.

Metodologi penyusunan Rencana Induk TIK merupakan suatu metode atau tahapan kegiatan yang terstruktur dengan merujuk pada standar-standar baku tertentu. Metodologi yang digunakan dalam menyusun dokumen Rencana Induk ini mengadopsi

metodologi yang diusulkan oleh Anita Cassidy dalam bukunya yang berjudul "Information Systems Strategic Planning" (2006).

Metodologi ini telah banyak digunakan dalam perumusan rencana strategis perusahaan-perusahaan yang berskala nasional maupun internasional serta beberapa lembaga pemerintahan yang ada di Indonesia.

Namun demikian, metodologi yang tertuang dalam buku tersebut bersifat generic dan disusun untuk bias diaplikasikan di semua sektor usaha. Tentu saja, tidak semuanya perlu digunakan untuk penyusunan Rencana Induk Pemerintah Kabupaten Maros. Oleh karenanya, hanya bagian-bagian relevan saja yang diadopsi. Selain itu, terdapat beberapa referensi lain seperti tercantum pada daftar pustaka.

Berdasarkan rujukan tersebut maka tahapan pelaksanaan Rencana Induk e-Government Pemerintah Kabupaten Maros dilakukan sebagai berikut:

Proses	Kegiatan	Metode/Teknik
FASE I : VISIONING		
1. Inisiasi kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menentukan tujuan dan batasan ▪ Membuat rencana keluaran (<i>deliverables</i>) ▪ Menentukan partisipan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Literature study
2. Memahami kondisi organisasi saat ini	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Me-review dokumen organisasi ▪ Membangun instrumen & struktur Wawancara & Survey ▪ Membuat rencana wawancara dan survey ▪ Melakukan wawancara & survey ▪ Dokumentasi hasil wawancara dan survey 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Interview ▪ Survey
3. Melakukan konfirmasi atas hasil analisis kondisi organisasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membuat gambaran kondisi organisasi berdasarkan visi, tujuan, strategi ▪ Memahami tren pengembangan lingkungan organisasi, kebutuhan organisasi dan stakeholder ▪ Memahami implikasi IS pada organisasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SWOT analysis ▪ FGD

FASE II : ANALYSIS		
1. Memahami kondisi SI saat ini	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Me-review dokumen SI ▪ Membangun struktur survey dan wawancara ▪ Melakukan survey dan wawancara ▪ Membuat dokumen hasil survey dan wawancara ▪ Menggambarkan kondisi SI saat ini 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Interview ▪ Survey Layanan SI ▪ Riwet Kinerja Organisasi SI
2. Analisis kondisi SI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan <i>benchmarking</i> ▪ Identifikasi tren SI ▪ Tinjauan kebutuhan informasi ▪ Tinjauan proses bisnis dan penggunaan aplikasi ▪ Membangun SWOT SI, peluang teknologi, <i>business enablers</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Benchmarking ▪ Assesmen Kebutuhan Informasi ▪ Survey Kondisi SI ▪ Assesmen Infrastruktur TI
3. Membuat rekomendasi dan solusi alternatif	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengembangkan opsi aplikasi & rekomendasi ▪ Mengembangkan opsi infrastruktur & rekomendasi ▪ Mengembangkan opsi organisasi & rekomendasi ▪ Mengembangkan opsi proses SI & rekomendasi 	
FASE III : DIRECTION		
1. Membangun visi dan tujuan SI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membangun visi dan misi Sistem Informasi ▪ Membangun tujuan dan strategi Sistem Informasi ▪ Membuat mekanisme dan kriteria pengembangan SI 	
2. Membangun rencana SI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membangun tujuan aplikasi ▪ Membangun tujuan infrastruktur ▪ Membangun tujuan organisasi SI ▪ Membangun tujuan proses SI 	
3. Identifikasi proyek SI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Identifikasi proyek (aplikasi, infrastruktur, organisasi, dan proses) ▪ Estimasi biaya ▪ Identifikasi manfaat ▪ Menentukan prioritas proyek SI 	
FASE IV : RECOMMENDATION		

1. Membangun roadmap	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjelaskan detail roadmap ▪ Membuat ringkasan biaya ▪ Ringkasan pengaruh terhadap organisasi ▪ Identifikasi risiko 	
2. Membangun business case	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ringkasan : manfaat bisnis 	
3. Menyampaikan hasil perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presentasi hasil perencanaan ▪ Penyerahan hasil perencanaan 	Presentasi

FASE 1 : VISIONING

Fase ini merupakan fase pertama dari proses perencanaan strategis, hal yang pertama dilakukan adalah inisiasi kegiatan perencanaan dan mengatur bagaimana proses perencanaan ini akan dilakukan dari awal sampai akhir. Sebagaimana layaknya sebuah proyek, hal yang perlu dilakukan adalah mengatur jadwal proyek (*schedule*), menentukan kegiatan (*task*) yang akan dilakukan, dan menentukan hasil (*deliverables*) dari proyek ini. Hal yang menjadi substansi dari fase ini adalah bagaimana memahami tujuan dari proyek perencanaan dengan mencoba menggali apa yang diharapkan oleh manajemen organisasi. Kemudian akan dilakukan identifikasi langkah-langkah atau kegiatan apa yang akan dilakukan kemudian dirangkai menjadi sebuah urutan kegiatan dan jadwal, selanjutnya ditentukan individu yang akan terlibat dalam proses perencanaan serta peran dan tanggung jawabnya.

Pada fase ini akan dilakukan pemahaman tentang kondisi organisasi saat ini melalui pendalaman dokumen yang berisi tentang visi, misi, tujuan, serta strategi bisnis organisasi. Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mendapatkan hal tersebut adalah melalui serangkaian wawancara, survey, atau me-review dokumen yang bisa didapatkan dari organisasi.

FASE 2 : ANALYSING

Pada fase kedua ini akan dilakukan analisis tentang bagaimana kondisi sistem informasi pada organisasi, hal ini dilakukan untuk memberi gambaran yang jelas tentang kondisi sistem informasi saat ini. Dari hasil analisis ini diharapkan akan diketahui bagian-bagian yang penting yang sebelumnya belum dapat diidentifikasi. Proses analisis ini akan dilakukan melalui serangkaian wawancara serta analisis berbagai dokumen yang ada.

Pada fase ini akan dilakukan dokumentasi semua aplikasi yang digunakan saat ini serta infrastruktur yang dimiliki, kemudian akan dilakukan review struktur organisasi sistem informasi, keterampilan (*skills*), peran (*roles*), dan tanggungjawab (*responsibilities*) organisasi SI yang ada dalam organisasi ini. Pada fase ini juga akan dilakukan review berapa jumlah anggaran dan belanja sistem informasi, kemudian akan dilakukan pula review tentang proyek SI yang sedang berjalan saat ini. Hal yang tak kalah pentingnya adalah melakukan observasi bagaimana organisasi lain memanfaatkan SI untuk pengembangan TIK di lingkup organisasi mereka.

FASE 3 : DIRECTION

Fase ini bertujuan untuk mencari dan menentukan formulasi strategi sistem dan teknologi informasi yang dapat mendukung organisasi dalam mencapai tujuannya. Hal ini dilakukan dengan me-review masing-masing tujuan bisnis dan menentukan solusi sistem informasi yang dapat diambil untuk membantu bisnis dalam mencapai tujuan tersebut. Kemudian akan ditentukan aplikasi yang dibutuhkan dengan menyusun portfolio aplikasi berdasarkan masing-masing tujuan. Selanjutnya menentukan arsitektur komputer yang dibutuhkan, termasuk didalamnya jika diperlukan perubahan perangkat PC, server, network serta perangkat komunikasi. Kemudian ditentukan arsitektur pelayanan sistem informasi, termasuk didalamnya rangkaian proses sistem informasi

serta orang-orang yang terkait dalam pelayanan sistem informasi. Langkah selanjutnya adalah menentukan alokasi sumberdaya sistem informasi.

Langkah terakhir pada fase ini adalah menentukan prioritas dari beberapa proyek sistem informasi yang telah diidentifikasi, hal ini bertujuan untuk menentukan proyek yang paling penting yang harus dilakukan dan menentukan proyek sesuai dengan kemampuan finansial organisasi serta waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian proyek.

FASE 4 : RECOMMENDATION

Fase recommendation ini berisi tentang detail roadmap dari proyek yang telah diidentifikasi, hal yang termasuk didalamnya adalah rangkuman biaya yang dibutuhkan, waktu pengerjaan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk masing-masing proyek. Kemudian untuk menyempurnakan perencanaan strategis ini, dilakukan beberapa proses analisis yaitu analisis terhadap investasi sistem informasi dengan *Return On Investment (ROI)*, kemudian dilakukan analisis tentang dampak organisasi, dan analisis tentang risiko-risiko yang akan dihadapi dalam proyek tersebut.

Sebuah dokumen perencanaan strategis harus dimengerti oleh pihak yang awam tentang pengetahuan sistem informasi sekali pun. Oleh karena itu pada proses perencanaan ini akan dibuat sebuah *business case* yang bertujuan untuk memberi pengertian dan pemahaman tentang substansi dari perencanaan strategis ini sehingga mereka dapat menerima dengan baik.

Survei

Survei dilakukan untuk mendapatkan data kondisi eksisting organisasi di lapangan. Survei dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan kepada penanggungjawab TIK di masing-masing Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) di lingkup Kabupaten Maros. Sementara observasi digunakan untuk mendapatkan data yang tidak diperoleh dari proses wawancara.

Focused Group Discussion

Focus group discussion yang lebih terkenal dengan singkatannya FGD merupakan salah satu metode riset kualitatif yang paling terkenal selain teknik wawancara. FGD adalah diskusi terfokus dari suatu group untuk membahas suatu masalah tertentu, dalam suasana informal dan santai. Jumlah pesertanya bervariasi antara 8-12 orang, dilaksanakan dengan panduan seorang moderator. Berbeda dengan riset kuantitatif yang metodologinya memiliki sifat pasti (*exact*), metode FGD yang bersifat kualitatif memiliki sifat tidak pasti, berupa eksploratori atau pendalaman terhadap suatu masalah dan tidak dapat digeneralisasi.

FGD ini digunakan untuk melakukan konfirmasi atas data yang telah dikumpulkan di lapangan. Acuan diskusi adalah kesimpulan sementara dari hasil analisis serta fakta-fakta penting yang perlu diketahui oleh peserta diskusi.

1.5. Dasar Hukum Pelaksanaan

Landasan hukum pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen rencana induk TIK ini adalah beberapa peraturan yang terkait dengan TIK maupun e-government diantaranya adalah:

1. UU NO. 32 Tahun 2004 (Perubahan UU 22/1999) Tentang Pemerintah Daerah.
2. UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)
3. UU No.14 Th. 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendencygunaan Telematika di Indonesia.
5. Kerangka kerja Teknologi Informasi Nasional (National IT Framework).

6. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003, tentang Strategi dan Kebijakan Nasional Pengembangan e-government.
7. PP No. 56 Th. 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Keppres No. 9 Th. 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia.
9. Kepres 20/2006 Pembentukan DETIKNAS (Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional).
10. Kepmen 57/KEP/M.KOMINFO/12/2003, tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government Lembaga
11. KepMendagri No. 45 Th. 1992 tentang Pokok-pokok Kebijaksanaan Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri.
12. KepMenpan No. 13/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah.
13. Blueprint Sistem Aplikasi e-Government, Depkominfo, 2004

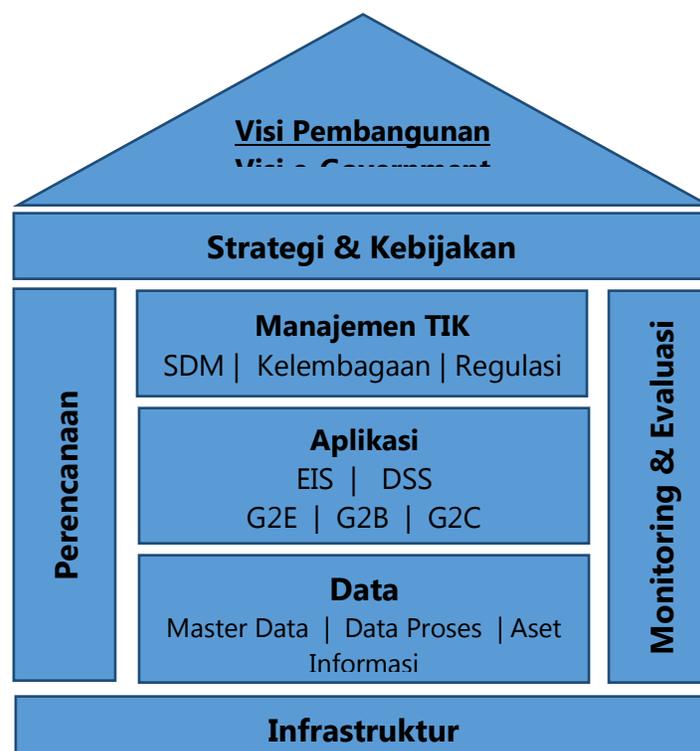
BAB II

Kerangka Pemikiran

Pada bagian ini akan dijelaskan kerangka berpikir yang digunakan dalam penyusunan Revisi RITIK Kabupaten Maros. Disini akan dijelaskan tentang konsep kerangka e-government (e-government framework) serta tujuan pengembangan e-government.

2.1. e-Government Framework

Definisi e-Government adalah Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Manfaat dari pelaksanaan e-government diantaranya karyawan bisa bekerja lebih efisiensi, efektif, transparan, sehingga mampu membangkitkan partisipasif masyarakat dalam pembangunan daerahnya, serta membangkitkan inovasi baru dalam memberikan layanan pada masyarakat. Arsitektur e-Government dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Arsitektur e-Government

Pelaksanaan e-Government harus sejalan dengan visi dan misi pembangunan daerah, pada tahap awal yang harus dibangun adalah infrastruktur Teknologi Informasi berupa akses internet ke pemerintah daerah. Selanjutnya secara bertahap dibangun basis data, aplikasi dan tatakelolanya dimana prosesnya mulai dari perencanaan–tahapan implementasi dan monitoring serta evaluasi. Seluruh rangkaian aktifitas implementasi e-Government ini, untuk mencapai misi yang sejalan dengan misi pembangunan daerah maka perlu aktor yang membangun kebijakan dan strategi implementasinya.

2.2. Tujuan e-Government

Tujuan penerapan e-government adalah :

1. Peningkatan layanan publik :
 - a. Kemudahan akses dan informasi atas pelayanan
 - b. Pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat
 - c. Meningkatkan kemampuan penggunaan TIK masyarakat
 - d. Interaksi yang aktif dalam proses pelayanan
2. Efisiensi dan efektivitas pemerintahan
 - a. Mempercepat analisis dan proses pengambilan keputusan
 - b. Menurunkan biaya dan anggaran Negara
 - c. Memperkuat kolaborasi dan knowledge-sharing
 - d. Memperkuat knowledge based manajemen birokrasi
 - e. Memperkuat sinergi antar instansi pemerintahan
 - f. Mengurangi jumlah proses, struktur dan orang
 - g. Memperkuat dokumentasi data dan informasi
 - h. Menekan tingkat korupsi
3. Akuntabilitas dan partisipasi :
 - a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program

- b. Penguatan produktivitas kinerja
- c. Transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran
- d. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan

2.2.1. Layanan e-Government

E-Government sendiri berkaitan erat dengan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah yang mempunyai kemampuan untuk mengakomodir kebutuhan warganya. Penerapan teknologi dalam pemerintahan mempunyai tujuan yang sangat beragam, di antaranya adalah: pemberian layanan pemerintahan yang lebih baik kepada warganya, peningkatan interaksi dengan dunia usaha dan industri, pemberdayaan masyarakat melalui akses informasi, atau manajemen pemerintahan yang lebih efisien. Hasil yang diharapkan dapat berupa pengurangan korupsi, peningkatan transparansi, peningkatan kenyamanan, penambahan pendapatan dan pengurangan biaya.

2.2.2. Layanan Infrastruktur

Layanan Infrastruktur TIK adalah layanan teknologi informasi berupa :

1. Hardware :
 - a. akses jaringan
 - b. storage,
 - c. server untuk melakukan proses data
 - d. terminal / clients untuk entry data
 - e. Media transmisi (FO, wireless, UTP/STP Cable) dll
2. Software :
 - a. operating system
 - b. database
 - c. monitoring
 - d. midleware

- e. aplikasi dasar : e-mail, FTP
- f. IP
- g. Bandwidth, dll

Segmen target layanan diantaranya :

- G2G : Layanan infrastruktur TI bagi instansi pemerintah diluar kendali struktural pemerintah daerah diantaranya : Kepolisian, KPU dll
- G2B : Layanan infrastruktur bagi kelompok usaha rintisan pemerintah daerah
- G2C : Layanan infrastruktur pada area tertentu dalam kota dalam rangka perluasan aksesabilitas masyarakat terhadap dunia maya.
- G2E : Layanan infrastruktur TI bagi internal pemerintah daerah diantaranya kepada SKPD, kelurahan, Puskesmas dll

2.2.3. Layanan Aplikasi

Layanan aplikasi TIK adalah layanan teknologi informasi berupa : ketersediaan data dan aplikasi baik yang proprietary maupun yang opensource



Gambar 2. Target layanan sistem informasi

Segmen target layanannya adalah:

- *Government to Citizens (G2C)*. Tipe G2C ini merupakan aplikasi e-Government yang paling umum, yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat (rakyat). Tujuan dari dibangunnya aplikasi e-Government bertipe G-to-C adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari. Contoh aplikasinya adalah sebagai berikut: e-recruitment, e-health, e-education, diseminasi informasi pengetahuan dan lainnya.
- *Government to Business (G2B)*. Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam melakukan aktivitas sehari-harinya, entiti bisnis semacam perusahaan swasta membutuhkan banyak sekali data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Disamping itu, yang bersangkutan juga harus berinteraksi dengan berbagai lembaga kenegaraan karena berkaitan dengan hak dan kewajiban organisasinya sebagai sebuah entiti berorientasi profit. Diperlukannya relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis tidak saja bertujuan untuk memperlancar para praktisi bisnis dalam menjalankan roda perusahaannya, namun lebih jauh lagi banyak hal yang dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan efektif dengan industri swasta. Contoh dari aplikasi e-Government berjenis G2B ini adalah sebagai berikut : e-tax dan e-procurement.
- *Government to Governments (G2G)*. Kebutuhan untuk berinteraksi antar satu pemerintah dengan pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal-hal yang berbau diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar

kerjasama antar negara dan kerjasama antar entiti-entiti negara (masyarakat, industri, perusahaan, dan lain-lain) dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya, dan lain sebagainya. Berbagai penerapan e-Government bertipe G-to-G ini yang telah dikenal luas antara lain:

- Antar negara : Pengembangan suatu sistem basis data intelijen yang berfungsi untuk mendeteksi cegah dan tangkal; Sistem informasi di bidang hak cipta intelektual untuk pengecekan dan pendaftaran terhadap karya-karya tertentu yang ingin memperoleh hak paten internasional; dan lain sebagainya.
- Antar instansi dalam negeri : transaksi data / informasi dalam kerangka integrasi data / informasi untuk sistem informasi bantuan pengambilan keputusan ataupun sistem informasi pelaporan eksekutif.
- *Government to Employees (G2E)*. Pada akhirnya, aplikasi e-Government juga diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan karyawan pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Berbagai jenis aplikasi yang dapat dibangun dengan menggunakan format G-to-E ini antara lain:
 - Sistem Informasi pengelolaan pegawai pemerintah : Sistem informasi kepegawaian untuk proses mutasi, rotasi, demosi, dan promosi seluruh karyawan pemerintahan; Sistem informasi tunjangan kinerja dan kesejahteraan; Sistem asuransi kesehatan dan pendidikan bagi para pegawai pemerintahan yang telah terintegrasi dengan lembaga-lembaga kesehatan (rumah sakit, poliklinik, apotik, dan lain sebagainya) dan institusi-institusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, kejuruan, dan lain-lain) untuk menjamin tingkat kesejahteraan karyawan beserta keluarganya;

- Sistem informasi pengelolaan kantor (e-Office) : Otomatisasi proses bisnis/birokrasi kantor pemerintah daerah : e-filling, e-mail, e-report, e-disposisi, Sistem Informasi Keuangan, dan sebagainya.

Dengan menyadari adanya bermacam-macam tipe aplikasi tersebut, maka terlihat fungsi strategis dari berbagai aplikasi e-Government yang dikembangkan oleh pemerintah daerah. Keberadaannya tidak hanya semata untuk meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya, namun lebih jauh lagi untuk meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang pada akhirnya bermuara pada kemajuan daerah.

BAB III

Kondisi Terkini

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil pengumpulan di lapangan. Beberapa bagian akan menjelaskan tentang kebijakan TIK yang sudah ada di Kabupaten Maros, kondisi kelembagaan, aplikasi yang digunakan dan pemanfaatannya, serta kondisi infrastruktur serta perencanaan pengembangannya. Selain itu akan dijelaskan pula beberapa penghargaan nasional yang pernah diraih Pemerintah Kabupaten Maros terkait pemanfaatan TIK.

3.1. Hasil Tinjauan

3.1.1. Kebijakan TIK

a. Kebijakan yang sudah dikeluarkan :

1. Peraturan Bupati Maros Nomor 79 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan e-Government dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros;
2. Keputusan Bupati Maros Nomor 106/KPTS/494/I/2011 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Informasi (TI) Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011;
3. Keputusan Bupati Maros Nomor 107/KPTS/494/I/2011 tentang Pengangkatan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyediaan Sistem Pengarsipan Digital Pada Bagian PDE Sekretariat Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011;
4. Keputusan Bupati Maros Nomor 156/KPTS/037/IV/2011 tentang Pembentukan Tim Penjawab SMS Centre Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Maros;
5. Keputusan Bupati Maros Nomor 180/KPTS/027/V/2011 tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Maros;

6. Keputusan Bupati Maros Nomor 69/KPTS/037/I/2012 tentang Pembentukan Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Maros Tahun 2012;
 7. Keputusan Bupati Maros Nomor 78.1/KPTS/555/I/2012 tentang Penunjukan Operator Komputer pada Bagian PDE Sekretariat Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012;
 8. Keputusan Bupati Maros Nomor 101/KPTS/037/I/2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Aplikasi e-Government Pemerintah Kabupaten Maros;
 9. Keputusan Bupati Maros Nomor 181/KPTS/073/III/2012 tentang Standar Penggunaan, Pengelolaan Dan Pemeliharaan Tower Serta Perangkat Jaringan Wireless Pemerintah Daerah Kabupaten Maros;
 10. Keputusan Bupati Maros Nomor 182/KPTS/073/III/2012 tentang Penggunaan Sistem Informasi dan Situs (Website) pada SKPD Tahun 2012.
 11. Peraturan Bupati Maros Nomor 23.3 tahun 2013 tentang uraian tugas pokok dan tata kerja Kantor Komunikasi dan Informatika.
- b. Setiap SKPD berharap bisa mempunyai kewenangan untuk membangun aplikasinya sendiri dengan bimbingan dari SKPD Kominfo
 - c. Pimpinan SKPD sangat berharap adanya peningkatan peran TIK sebagai alat untuk mempercepat proses bisnis di setiap SKPD dan bisa terintegrasi satu sama lain
 - d. Sampai saat ini belum ada SOP dan regulasi yang menyeluruh untuk pengembangan dan pemanfaatan TIK
 - e. Proses bisnis pada setiap SKPD banyak yang berpotensi untuk diotomatisasikan
 - f. Belum ada SOP atau regulasi terkait pengembangan dan pemanfaatan TIK untuk setiap SKPD

- g. Belum ada kebijakan tentang pemanfaatan Internet, sehingga fasilitas ini lebih banyak digunakan untuk browsing, email, dan jejaring sosial.
- h. Adanya SKPD yang membangun sendiri infrastruktur dan aplikasinya tanpa berkoordinasi dengan Kominfo. Kondisi ini beresiko pada terjadinya in-efisiensi pengelolaan anggaran dan sistem pengamanan informasi.
- i. Aset informasi pemerintah daerah merupakan rahasia negara dimana untuk mendapatkannya memerlukan prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang. Pelanggaran atas aturan ini bisa dikategorikan sebagai tindak pidana pembocoran rahasia negara sedangkan pemborosan uang negara bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi ataupun kesalahan ketidakcermatan penggunaan anggaran negara.
- j. Untuk menjamin efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan e-Government, maka diperlukan kebijakan yang mengatur area kegiatan mana yang menjadi kewenangan mutlak SKPD Kominfo dan mana yang bisa didelegasikan ke masing-masing SKPD
- k. Kebijakan SKPD Kominfo dalam masalah belanja modal (capex) /belanja operasional (opex) masih belum ada, sehingga implementasi pengadaan barang dan jasa masih belum memiliki acuan yang jelas.
- l. Pengelolaan TIK pada dasarnya harus mengacu ke satu standar tertentu diantaranya, untuk pengamanan informasi digunakan ISO 27001, Layanan TI mengacu ke IT-IL, dan sebagainya. Namun sampai saat ini Pemda Maros masih belum menggunakan standar apapun dalam pengelolaannya.

3.1.2. Kelembagaan

- A. Kantor Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) Kabupaten Maros merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah baru, yang dibentuk untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah nomor: 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah serta memperhatikan kebutuhan pelayanan masyarakat sebagaimana hasil analisis Tim Analisis Jabatan dan Pengukuran Beban Kerja dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Keberadaan SKPD Kominfo dengan Tupoksinya sudah memadai, namun terhambat diimplementasikan lebih leluasa karena faktor kelembagaan

- B. Saat ini, SKPD pengelola urusan Komunikasi dan Informatika di Pemerintah Kabupaten Maros adalah Kantor Komunikasi dan Informatika yang dikepalai oleh Kepala Kantor setingkat eselon III. Adapun struktur organisasi dan tupoksinya seperti berikut ini.



Gambar 3. Struktur Organisasi Kantor Kominfo Kab. Maros

- C. Pada struktur tersebut terdapat fungsi pengolahan data yang bertugas dalam pengumpulan data, memutakhirkan data dan mengendalikan data dari masukan sampai keluaran. Kemudian fungsi jaringan dan komunikasi data serta sistem informasi dan aplikasi yang bertugas menjalankan fungsi pengelolaan infrastruktur TIK.

1. Kepala Kantor

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Kepala Kantor mempunyai fungsi :

- a) perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informasi;
- b) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan bidang komunikasi dan informasi;
- c) pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang komunikasi dan informasi;
- d) pelaksanaan tugas yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Uraian tugas Kepala Kantor Komunikasi dan Informasi sebagai berikut :

- a) Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Komunikasi dan Informasi berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten dan Kebijakan Kepala Daerah serta masukan dari komponen masyarakat untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan dibidang komunikasi dan informasi;
- b) Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- c) Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja dengan mengkompilasi rencana kerja dengan masing-masing seksi agar tersusunnya rencana Kerja Kantor Komunikasi dan Informasi;
- d) Memberikan bimbingan dan pelayanan teknis dibidang pembangunan dan pengembangan sistem informasi/telematika, pengendalian sistem informasi di lingkungan Pemerintahan Daerah melalui pelatihan-pelatihan untuk menyediakan tenaga yang profesional dalam bidang telekomunikasi dan informasi;
- e) Mengoreksi dan meneliti konsep program aplikasi di bidang komunikasi dan informasi berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja Kantor Komunikasi dan Informasi sebagai sumber data dan informasi;

- f) Mengendalikan dan mengawasi kegiatan perekaman, pengolahan, penyimpanan dan output data serta kegiatan penyiapan standar dan prosedur pembangunan dan pengembangan sistem informasi telematika yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak dalam kerangka Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menyediakan data/informasi secara cepat, reliabel dan akurat serta keterpaduan sistem informasi Pemerintah Daerah;
- g) Melakukan kerjasama teknologi informasi dengan instansi/lembaga terkait untuk pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi/telematika;
- h) Pembinaan dan pengembangan TIK lingkup SKPD Kabupaten Maros;
- i) Mengevaluasi pelaksanaan tugas komunikasi dan informasi berdasarkan rencana kerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan serta menyusun solusi pemecahan permasalahannya;
- j) Memberikan layanan administrasi yang meliputi perlengkapan rumah tangga, keuangan, kepegawaian dan urusan umum sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- k) Merumuskan dan menetapkan laporan pelaksanaan Budaya Kerja, Pengawasan Melekat, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, LKPJ, LPPD, Laporan Kinerja Keuangan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;
- l) Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
- m) Melakukan koordinasi tugas dengan instansi dan pihak terkait agar terjalin kerjasama yang baik;

- n) Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan Kantor Komunikasi dan Informasi serta laporan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Seksi Pengolahan Data

Seksi Pengolahan Data dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengumpulan data, memutakhirkan data dan mengendalikan data dari masukan sampai keluaran berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tersipnya data masukan dengan baik. Uraian tugas Kepala Seksi Pengolahan Data sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengolahan Data berdasarkan rencana kerja kantor dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- c) Menyusun pedoman kerja tentang pengumpulan, verifikasi, perekaman, dan pengendalian data hasil rekaman agar tersedianya data yang ada dapat di akses secara online;
- d) Melakukan pengendalian data dimulai dari pengumpulan, pemutahiran, perekaman guna mengupdatekan data-data;

- e) Merancang sistem performance data/informasi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan agar terwujudnya sumber data dan informasi yang terpadu;
- f) Mengevaluasi pelaksanaan tugas pengumpulan, verifikasi, perekaman dan pengendalian data hasil rekaman agar berjalan dengan baik;
- g) Menyiapkan bahan presentasi Bupati dan Wakil Bupati baik dalam daerah maupun luar daerah;
- h) Melakukan pembinaan dan pengembangan Infra struktur informasi dan data lingkup SKPD Kabupaten Maros;
- i) Mengelola Website Pemerintahan Kabupaten Maros www.maroskab.go.id;
- j) Melaksanakan kegiatan penyajian dan perluasan data melalui website www.maroskab.go.id;
- k) Mengelola e-mail Pemerintahan Kabupaten Maros;
- l) Memberikan rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan;
- m) Memberikan rekomendasi jasa titipan untuk kantor agen;
- n) Penertiban jasa titipan untuk kantor agen;
- o) Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi;
- p) Pemberian rekomendasi kantor cabang dan loket pelayanan operator;
- q) Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi;
- r) Memberikan rekomendasi usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi;
- s) Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;

- t) Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi atau lembaga terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- u) Membuat laporan bulanan dan tahunan Seksi Data Masukan serta laporan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
- v) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Seksi Penyiaran

Seksi Penyiaran dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis, mengkoordinasi dan kerja sama dengan lembaga terkait di bidang penyiaran dan kemitraan media. Uraian tugas Kepala Seksi Penyiaran sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kegiatan Seksi Penyiaran berdasarkan rencana kerja kantor dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- c) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan rekomendasi izin film, rekaman video dan permainan elektronik;
- d) Melaksanakan pelayanan informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat melalui siaran radio, televisi, penerangan mobil, pemutaran film dan media elektronik lainnya;

- e) Memberikan rekomendasi izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;
- f) Memberikan rekomendasi izin terhadap penyelenggaraan pemutaran film, peredaran film, rekaman video dan permainan elektronik;
- g) Memberikan rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio;
- h) Memberikan rekomendasi izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi.
- i) Melakukan pembinaan terhadap usaha perfilman, rekaman video, pengusaha rental video dan permainan elektronik;
- j) Memberikan rekomendasi izin penyelenggaraan pameran, pekan promosi dan propaganda;
- k) Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemutaran film, peredaran film, rekaman video dan permainan elektronik;
- l) Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi;
- m) Melaksanakan pemberdayaan dan pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Forum Koordinasi Kehumasan (FKK) tingkat Kabupaten Maros;
- n) Pelaksanaan diseminasi informasi nasional.
- o) Mengkoordinir dan memfasilitasi pengembangan kemitraan media tingkat Kabupaten Maros;
- p) Melaksanakan kegiatan penerangan, komunikasi dan hubungan masyarakat dalam rangka penyebaran informasi melalui media pameran dan pertunjukan rakyat;
- q) Melaksanakan pemberdayaan dan pembinaan komunikasi massa;

- r) Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi atau lembaga terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- s) Membuat laporan bulanan dan tahunan Seksi Penyiaran serta laporan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
- t) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Seksi Jaringan dan Komunikasi Data

Seksi Jaringan dan Komunikasi Data dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan jaringan dan komunikasi data melalui pemeliharaan aplikasi jaringan, menginventarisasi perangkat keras dan perangkat lunak, spesifikasi pengadaan komputer dan kerjasama teknik berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tersedianya jaringan sistem manajemen dan komunikasi data (telematika) yang integral dan uptodate. Uraian tugas Kepala Seksi Jaringan dan Komunikasi Data sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kegiatan Seksi Jaringan dan Komunikasi Data berdasarkan rencana kerja kantor dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- c) Menjaga dan memelihara sistem jaringan dan server jaringan agar tetap terpelihara dan arus komunikasi dan informasi dapat berjalan dengan baik;

- d) Mengendalikan Security Networking agar data-data yang bersifat rahasia dapat terjaga kerahasiaannya;
- e) Membangun dan mengembangkan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan arus data dengan teknologi informasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f) Membangun sistem jaringan guna mencapai kesamaan persepsi dalam pembangunan sistem informasi untuk memudahkan akses dan komunikasi data pada semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Maros;
- g) Menyusun pedoman kerja tentang prosedur kerja tentang jaringan komunikasi yang berkaitan dengan implementasi komputerasi bagi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian sistem informasi manajemen Pemerintah Kabupaten Maros;
- h) Mengevaluasi pelaksanaan tugas pengamanan data dan kerja sama antar seksi yang bertalian dengan perencanaan, pembangunan dan pelaksanaan komputerasi baik kegiatan SIMDA Kabupaten unit intern dan ekstern Pemerintah Kabupaten Maros;
- i) Memfasilitasi pembangunan infrastruktur TIK di lingkup SKPD Kabupaten Maros dalam rangka mendukung pengembangan data dan informasi;
- j) Melakukan pembinaan dan pengembangan Infrastruktur jaringan dan komunikasi data lingkup SKPD Kabupaten Maros;
- k) Melaksanakan Help Desk untuk Layanan Internet Gratis, LPSE, dan TIK di lingkup SKPD Kabupaten Maros;
- l) Melakukan monitoring operasi semua infrastruktur jaringan LAN dan MAN di lingkup SKPD Kabupaten Maros;

- m) Melakukan konsultasi yang berkaitan dengan implementasi komputerasi bagi kegiatan SIMDA dengan instansi/pihak terkait agar tercipta hubungan kerjasama yang baik;
- n) Memberikan rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal wireline (end-to-end) cakupan kabupaten/kota;
- o) Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kabupaten/kota, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya;
- p) Memberikan rekomendasi izin terhadap menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi;
- q) Memberikan rekomendasi izin terhadap galian untuk keperluan penggalian kabel telekomunikasi dalam satu kabupaten/kota;
- r) Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
- s) Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi atau lembaga terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- t) Membuat laporan bulanan dan tahunan Seksi Jaringan Komunikasi Data serta laporan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
- u) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

5. Seksi Sistem Informasi dan Aplikasi

Seksi Sistem Informasi dan Aplikasi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan sistem aplikasi melalui survei dan identifikasi, uji coba dan monitoring serta evaluasi pengembangan sistem aplikasi dan informasi/telematika berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya sistem yang berbasis kinerja. Uraian tugas Kepala Seksi Informasi dan Aplikasi sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kegiatan Seksi Sistem Informasi dan Aplikasi berdasarkan rencana kerja kantor dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- c) Menyusun pedoman kerja tentang standar, prosedur pembangunan dan pengembangan sistem aplikasi dan informasi/telematika mencakup perangkat keras dan perangkat lunak;
- d) Melakukan survei dan identifikasi sistem aplikasi yang akan dikembangkan agar efektif dan efisien;
- e) Melakukan uji coba penerapan sistem aplikasi dan informasi/telematika guna penyempurnaan sistem aplikasi;
- f) Melaksanakan pengembangan sistem aplikasi data dan informasi/telematika guna peningkatan kinerja aparat Pemkab. Maros;
- g) Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pengadaan sistem aplikasi dan informasi/telematika di Kabupaten Maros;
- h) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan infrastruktur sistem aplikasi telematika lingkup SKPD Kabupaten Maros;

- i) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang TIK lingkup SKPD Kabupaten Maros;
 - j) Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
 - k) Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi atau lembaga terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - l) Membuat laporan bulanan dan tahunan Seksi Pengembangan Sistem Aplikasi serta laporan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
 - m) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- D. Tugas pokok dan Fungsi Kebijakan Pengembangan dan Pengelolaan TIK telah dibebankan sepenuhnya ke SKPD Kominfo, akan tetapi tidak semua permasalahan TIK mampu ditangani oleh SKPD ini dikarenakan keterbatasan sumberdaya yang ada, hal ini biasa terjadi disemua SKPD. Pasti nya tidak semua kebijakan dan pengelolaan urusan SKPD mampu ditangani hanya oleh SKPD tersebut.
- E. Saat ini hampir setiap aktifitas pengembangan dan pemanfaatan TIK lebih banyak dilaksanakan oleh masing-masing SKPD, Kominfo lebih pada pengelolaan jaringan utama (*backbone*) dan help desk apabila terjadi permasalahan jaringan.
- F. Personil pelaksana pengelolaan TIK di setiap SKPD banyak yang mempunyai latar belakang pendidikan Non TIK tapi mempunyai ketrampilan bidang TIK. Ada

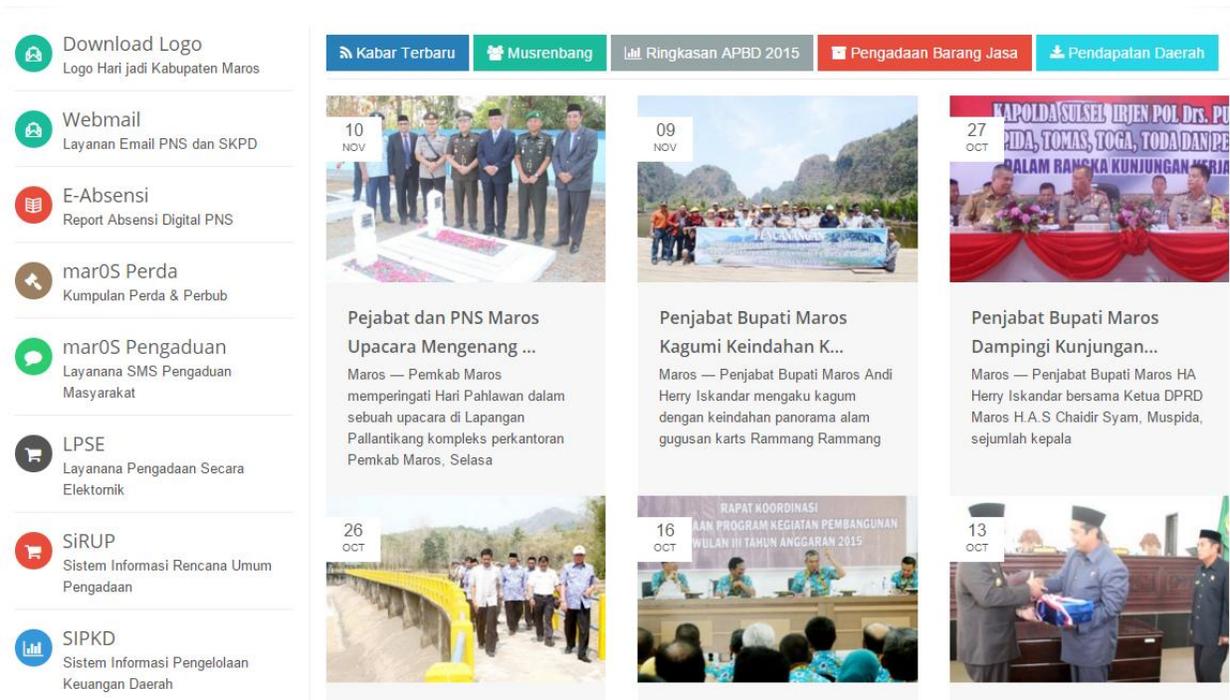
beberapa orang pegawai berpendidikan TIK akan tetapi tidak di optimalkan untuk melaksanakan kegiatan di bidang TIK, hanya beberapa pegawai saja yang mendapat penugasan bidang TIK.

3.1.3. Aplikasi

Berikut Aplikasi yang dikelola oleh Kantor Kominfo dan SKPD lain di Kabupaten Maros :

1. Webmail : Layanan Email PNS dan SKPD
2. E-Absensi : Report Absensi Digital PNS
3. marOS Perda : Kumpulan Perda & Perbub
4. marOS Pengaduan : Layanana SMS Pengaduan Masyarakat
5. LPSE : Layanana Pengadaan Secara Elektornik
6. SiRUP : Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan
7. SIPKD : Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
8. marOS Sehat : Sistem Informasi Kesehatan
9. marOS Pegawai : Sistem Informasi Kepegawaian
10. marOS Ijin : Sistem Informasi Perijinan Online
11. marOS Plan : Sistem Informasi Perencanaan Terpadu
12. marOS Pendapatan : Sistem Informasi Pendapatan Daerah

Seluruh aplikasi dibangun berbasis web dan dapat diakses melalui portal maroskab.go.id.



Gambar 4. Portal maroskab.go.id

3.1.4. Infrastruktur

- 1) Ruang Laboratorium : sebagai tempat pelatihan
- 2) Bandwith internet Pemerintah Kabupaten Maros : 100 mbps telah mengkoneksi seluruh SKPD
- 3) Jaringan Wireless : 98 titik (SKPD/Kelurahan/Desa)
- 4) Jaringan Fiber Optik

3.1.5. Perencanaan

SKPD Kominfo telah melakukan penyusunan Rencana Induk TIK untuk masa pembangunan 2013-2015. Dokumen tersebut bertujuan sebagai hasil perumusan kebijakan teknis dibidang pengolahan data, penyiaran, jaringan dan komunikasi data, sistem informasi dan aplikasi, dan pengelolaan web site; kemudian menjadi dokumen program dan kegiatan lingkup Kantor Kominfo selama lima tahun kedepan (2013 - 2015) untuk kemudian diuraikan kedalam Rencana Kerja Kantor Kominfo untuk setiap tahun berjalan; rumusan program pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan

pemerintahan yang merupakan indikasi program yang tertuang dalam APBD dan sebagai tolak ukur dalam pencapaian kinerja Kantor Kominfo Kab. Maros; dan sebagai acuan dasar dalam pengembangan kualitas SDM dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintahan secara efektif dan efisien.

3.2. Penghargaan Nasional

ICT Pura



ICT Pura dilaksanakan untuk menyikapi pesatnya perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta meluasnya perkembangan infrastruktur informasi global, telah mengubah pola dan tata cara kegiatan bisnis perdagangan dan pemerintahan.

Konsekuensi logis dari fenomena tersebut telah berdampak positif terhadap perkembangan TIK. Juga sebagai salah satu upaya meningkatkan pembangunan di bidang TIK secara nasional.

Kabupaten Maros menerima penghargaan Information Technology Communication (ITC) Pura 2011. Penghargaan ini sebagai bukti keberhasilan Maros dalam penerapan Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK) tingkat nasional.

IDSA



Kabupaten Maros meraih penghargaan bergengsi Indonesia Digital Society Award (IDSA) 2015. Penghargaan ini diberikan atas komitmen Maros terhadap penerapan dan pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). IDSA diselenggarakan oleh MarkPlus.Inc, Kementerian Komunikasi dan

Informatika dan PT TELKOM. Penilaian dilakukan berdasarkan survey yang diadakan untuk meningkatkan upaya digitalisasi dan peningkatan daya saing kota dan kabupaten di era globalisasi, komunikasi dan informasi.

BAB IV

Analisis

Pada bagian ini akan dijelaskan secara terstruktur hasil analisis terkait resiko yang berpotensi muncul dalam pengembangan TIK khususnya e-Government di Kabupaten Maros. hal tersebut mencakup faktor kebijakan, kelembagaan, aplikasi, infrastruktur, serta perencanaan. Pada bagian ini juga akan dijelaskan hasil analisis SWOT yang dan analisis strategik yang menghasilkan formulasi penyusunan strategi pengembangan TIK di Kabupaten Maros ke depan.

4.1. Analisis Resiko

4.1.1. Kebijakan

- Belum adanya kebijakan di level strategis, dan taktis, baru ada 2 kebijakan yang telah diterbitkan di level operasional yaitu tata naskah dinas elektronik dan operasional e-procurement. Kebijakan level strategis dan taktis sangat dibutuhkan sebagai pedoman pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan TIK di semua SKPD.
- Visi dan Misi yang ada masih sangat general dan tidak mengacu ke tema pembangunan daerah, sehingga sulit menentukan skala prioritas pengembangan e-governmentnya.
- Belum terkoordinasinya kegiatan dan anggaran untuk pengembangan dan pemanfaatan TIK untuk seluruh SKPD, sehingga sulit melakukan perencanaan dan evaluasi atas efektifitas dan efisiensi anggaran TIK sebagaimana tujuan diselenggarakannya e-Government
- Belum ada SOP pengadaan, perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian terkait dengan pengembangan e-Government Pemda Maros, hal ini beresiko pada penyelenggaraan pengadaan dan pemanfaatan TIK untuk masing-masing SKPD tidak sinkron dan tidak standar yang memicu kerentanan in-efisiensi anggaran

4.1.2. Kelembagaan

- Belum dibentuk organisasi fungsional seperti CIO atau Dewan TIK daerah sebagaimana pengarahannya dari kemenkominfo pada Permen Kominfo Nomor 41 th 2007, organisasi ini dipimpin langsung oleh kepala daerah untuk fungsi yang menentukan kebijakan dan monev pengembangan dan pemanfaatan TIK, hal ini berisiko banyak usulan kebijakan dari pejabat eselon 3 tidak bisa menjangkau ke seluruh SKPD yang sebagian besar berada di eselon 2.
- Unit Kominfo saat ini belum mengontrol sepenuhnya atas pengembangan dan pemanfaatan TIK serta kontrol anggaran secara terintegrasi, dikarenakan belum optimalnya kewenangan yang diberikan. sehingga belum mampu menyediakan e- government yang efektif dan efisien dilingkungan Pemerintah Pemda Maros. Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan TIK di Maros sangat penting sebagaimana diamanahkan dalam pengembangan e-government yang bertujuan untuk efisien dan efektifnya kinerja pemerintahan dengan pemanfaatan TIK.
- Semangat membangun sistem informasi di SKPD sudah sedemikian maju pesatnya akan tetapi masih belum diakomodasi oleh Unit Kominfo, bahkan di beberapa SKPD sudah akan mulai membangun sistem terintegrasi, perlu segera dibuat kebijakan dimana kantor Kominfo mampu mengontrol semua aktifitas pengembangan dan pemanfaatan TIK di Pemda Maros.
- Pegawai pemerintah Kabupaten Maros yang berlatar belakang TIK sekitar 2% dari 7.000 orang, akan tetapi yang termanfaatkan optimal untuk pekerjaan terkait TIK tidak lebih dari beberapa orang saja. SDM yang dikelola oleh Unit Kominfo masih jauh dari mencukupi untuk mengelola TIK di seluruh SKPD, sehingga banyak pekerjaan yang semestinya dikerjakan sendiri karena alasan keamanan informasi dengan terpaksa dilaksanakan oleh pihak ketiga selain itu SKPD perlu mengelola

sendiri SDM TIKnya, padahal SKPD tidak mempunyai tupoksi pengelolaan TIK, sehingga kegiatan pengembangan dan pengelolaan TIK di SKPD non Kominfo tidak bisa didanai langsung oleh SKPD bersangkutan, hal ini beresiko pada penyalahgunaan administratif untuk mendukung kegiatan terkait TIK yang tetap saja merupakan kesalahan didepan hukum.

- Pelatihan teknis masih belum memadai hal ini beresiko pada kurang optimalnya layanan infrastruktur TIK

4.1.3. Aplikasi

- Banyak aplikasi yang sudah dikembangkan oleh SKPD akan tetapi karena SKPD tidak memiliki sumberdaya yang memadai sehingga aplikasi tersebut menjadi kurang optimal pemanfaatannya karena tidak didukung oleh infrastruktur TIK yang memadai yang seharusnya dikelola oleh Unit Kominfo.
- Sistem informasi untuk pemerintahan di kecamatan dan kelurahan masih belum dibangun sehingga infrastruktur yang ada masih belum dimanfaatkan optimal untuk kebutuhan e-government, masih sebatas untuk berselancar di internet yang sering tidak terkait langsung dengan kegiatan kantor. Statement keluhan oleh salah satu pejabat kecamatan, bahkan pemanfaatan internet yang kurang pas terkadang malah menjadi kontra-produktif.
- Resiko yang muncul dari sisi kondisi aplikasi TIK yang ada sekarang adalah sebagai berikut:
 - Inefisiensi Anggaran akibat kurang optimalnya operasional aplikasi
 - Penurunan kinerja akibat kurang optimalnya operasional aplikasi
- Data masih terserak di setiap SKPD dan belum di inventarisir oleh satu SKPD. Resiko yang muncul atas kondisi data yang ada sekarang adalah sebagai berikut:
 - Kesulitan dalam pencarian data

- Kesulitan dalam pelaporan data
- Resiko dalam keamanan data
- Resiko dalam integritas data

4.1.4. Infrastruktur

- Pengembangan Infrastruktur TIK sudah sangat mendesak untuk dituntaskan. Sebagai daerah yang sangat potensial dan sering menjadi tempat terselenggaranya even lokal, nasional bahkan internasional, sudah seharusnya Kabupaten Maros memiliki sistem informasi dan infrastruktur TIK yang memadai.
- Belum dilakukan pengelolaan bandwidth sehingga berapapun bandwidth tersedia akan selalu terasa kurang sehingga beberapa SKPD tetap ingin mengadakan sendiri kebutuhan bandwidthnya melalui jasa operator lain sesuai keinginan SKPD tersebut, hal ini beresiko pada optimalisasi sumber daya TI dan kegiatan pemanfaatan Tik tidak bisa terkontrol dengan baik
- Sistem pengamanan informasi/jaringan baik kabel maupun nirkabel sudah dilaksanakan namun belum diaudit. SKPD yang sudah terhubung jaringan internet terkendala dalam penyediaan LAN, hal ini terkait pula dengan kendala peran Kantor Kominfo dalam penyediaan LAN SKPD termasuk kontrol setiap LAN SKPD

4.1.5. Perencanaan

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) belum secara eksplisit menjadikan TIK sebagai pendukung semua aspek dan diperlukan percepatan untuk pemanfaatannya
- Belum disusun *Business Continuity Plan (BCP)* pengelolaan infrastruktur TIK, sehingga jika suatu saat terjadi kegagalan layanan, maka Unit Kominfo kesulitan untuk melakukan suatu tindakan yang cepat, akurat dan efektif untuk menjamin keberlangsungan sistem

- Belum terkoordinasinya pengusulan kegiatan TIK SKPD, hal ini menyulitkan pengambil kebijakan untuk melakukan optimalisasi anggaran di sektor TIK
- Saat ini belum berjalan fungsi perencanaan dan kontrol atas penerapan e-Government di Pemerintah Kabupaten Maros. Resiko yang dapat muncul adalah sebagai berikut:
 - Implementasi TIK tidak dapat terukur langsung dalam menunjang misi pembangunan Kabupaten Maros
 - Ketimpangan dalam implementasi TIK di unit-unit di lingkungan Pemda Maros
 - Ketidak-seragaman standar teknologi, kebijakan dan kewajaran harga dalam pelaksanaan kegiatan TIK di SKPD
 - Redundansi kegiatan terkait TIK, yang sebenarnya dapat diintegrasikan
 - Tidak terintegrasinya kegiatan-kegiatan TI.
- Resiko yang muncul dari atas kondisi monitoring dan evaluasi TIK yang ada sekarang adalah sebagai berikut:
 - Kesulitan untuk keberlangsungan aplikasi dalam jangka panjang
 - Tidak diketahuinya secara jelas kondisi dari implementasi TIK

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi eksisting implementasi e-government yang ada di Pemerintah Kabupaten Maros, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa resiko yang harus di kelola dengan baik. Sehingga resiko-resiko ini menjadi keuntungan (*benefit*) dalam mendukung program pembangunan e-government di Pemerintah Kabupaten Maros. Berikut ini adalah resiko-resiko tersebut :

- a) Risiko-risiko prioritas dalam pengelolaan TIK oleh institusi pemerintahan mencakup risiko proyek, risiko atas informasi, risiko atas keberlangsungan layanan sebagai berikut:
- Risiko atas proyek mencakup kemungkinan tertundanya penyelesaian proyek TIK, biaya yang melebihi dari perkiraan atau hasil akhir proyek tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan di awal.
 - Risiko atas informasi mencakup akses yang tidak berhak atas aset informasi, perubahan informasi oleh pihak yang tidak berhak dan penggunaan informasi oleh pihak yang tidak punya hak untuk keperluan yang tidak sebagaimana mestinya.
 - Risiko atas keberlangsungan layanan mencakup kemungkinan terganggunya ketersediaan layanan TIK atau layanan TIK sama sekali tidak dapat berjalan.
- b) Kontrol atas risiko proyek, risiko atas informasi, dan risiko atas keberlangsungan layanan secara umum mencakup :
- Implementasi pengembangan dan pemanfaatan TIK untuk mengikuti kaidah penyelenggaran e-Government sesuai pengarahan Kemenkominfo.
 - Implementasi *Security Governance* di manajemen TIK dan seluruh sistem TIK yang berjalan, khususnya untuk meminimumkan risiko atas informasi dan keberlangsungan layanan.

4.2. Analisis SWOT

Analisis SWOT digunakan oleh tim penyusun dokumen rencana induk ini untuk mendapatkan gambaran yang terukur dari 4 sudut pandang penilaian tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terhadap pengembangan dan pembangunan e-government di Pemerintah Kabupaten Maros. Analisis SWOT ini juga dapat menjadi dasar rekomendasi kepada para pemangku kepentingan agar kedepan e-government di Kabupaten Maros menjadi lebih selaras dan sesuai dengan visi misi Kabupaten Maros.

Tentunya hal tersebut dapat tercapai dengan kerja keras dan fokus terhadap target dan capaian yang telah di tentukan dalam dokumen ini. Berikut dibawah ini tabel analisis SWOT

Kekuatan	Kelemahan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan daerah memiliki e-leadership 2. Adanya regulasi terkait kebijakan TIK 3. Sudah ada SKPD Kominfo 4. Memiliki 2% SDM yang berlatar belakang pendidikan TIK, ditambah dengan SDM yang berpengetahuan TIK meskipun tidak berlatar belakang pendidikan TIK 5. Sudah memiliki banyak aplikasi e-Government, baik yang dibangun Kominfo maupun SKPD lain 6. Sudah tersedia akses jaringan internet ke seluruh SKPD sampai dengan kelurahan/desa 7. Adanya peluang untuk membangun datacenter sendiri 8. Memiliki pengetahuan yang memadai untuk menyusun perencanaan e-government yang komprehensif 9. Pernah memperoleh award untuk pemanfaatan TIK dan pengembangan e-Government 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya sinergi antar SKPD untuk membangun e-Government 2. Belum banyak regulasi kebijakan untuk pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan e-government yang menjangkau ke seluruh sistem pemerintah daerah 3. Beberapa aplikasi yang ada belum digunakan secara optimal karena mindset penggunaan TIK belum dipahami. 4. SDM praktisi TIK masih belum merata dan dioptimalkan untuk pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan TIK 5. Pengembangan aplikasi dan pengelolaan data masih belum terintegrasi 6. Belum memiliki perangkat untuk memastikan ketersediaan akan kebutuhan akses jaringan yang sudah terpasang 7. Belum memiliki datacenter/data recovery center serta sistem pengamanan informasi yang memadai 8. Website yang ada belum terintegrasi dengan aplikasi e-government lainnya terutama terkait G2G.
Peluang	Tantangan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan tuntutan kinerja aparat untuk layanan masyarakat yang baik 2. Peningkatan efisiensi kerja sebagai dampak positif implementasi e-government sehingga dana yang terpangkas dapat dialihkan untuk pendanaan program lainnya. 3. Persaingan yang baik antar pemerintah daerah dalam meraih penghargaan nasional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahamkan kepada seluruh stakeholder, pimpinan daerah serta pegawai tentang peran strategis e-Government yang sejalan dengan pembangunan daerah 2. Banyaknya kasus kegiatan pengembangan TIK yang tidak sejalan dengan tujuan e-Government 3. Kondisi alam (topografi dan cuaca) yang sulit dipasang perangkat transmisi data

<p>4. Peningkatan kesejahteraan aparat apabila kinerjanya baik yang ditandai dengan indikator kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat</p> <p>5. Peningkatan peran e-government dalam pembangunan daerah</p>	<p>4. Perkembangan TI yang sangat cepat serta dinamika politik dan kemasyarakatan yang harus terakomodasi dalam perencanaan sistem</p>
--	--

4.3. Analisis Strategik

Visi pembangunan Kabupaten Maros berdasarkan RPJPD Tahun 2005-2025:

“Mewujudkan Maros yang Maju, Harmoni dan Sejahtera melalui pendekatan Kemandirian Lokal yang bernafaskan Iman dan Taqwa”

Selanjutnya berdasarkan Visi Pembangunan daerah Kabupaten Maros tersebut ditetapkan 7 (tujuh) Misi Pembangunan Daerah tahun 2005-2025 sebagai berikut:

1. Pemantapan kualitas iman dan taqwa bagi anggota masyarakat serta menciptakan hubungan antar pelaku pembangunan dan kelompok-kelompok masyarakat yang rukun dan harmonis untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah jangka panjang.
2. Penciptaan iklim pembangunan ekonomi dan sosial yang kondusif dan demokratis.
3. Peningkatan tersedianya kapasitas prasarana dan sarana pembangunan perkotaan dan pedesaan untuk mendukung terselenggaranya pembangunan daerah ke seluruh wilayah.
4. Peningkatan partisipasi secara nyata dan optimal dari masing-masing pelaku pembangunan dan kelompok-kelompok masyarakat dalam pembangunan.
5. Penguatan nilai-nilai sosial dan budaya lokal untuk meningkatkan semangat dan partisipasi aktif dalam melaksanakan pembangunan.

6. Peningkatan kinerja dan pengembangan kelembagaan pemerintah daerah yang berdayaguna, berhasilguna dan berkemampuan tinggi.
7. Peningkatan kemandirian (lokal) Kabupaten Maros sebagai daerah otonom dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan umum dibidang ekonomi, sosial budaya dan politik yang makin berkembang.

Visi Kantor Komunikasi dan Informatika :

“Maros Connected 2015”

Misi Kantor Komunikasi dan Informatika :

1. Mewujudkan SDM Aparatur yang kompeten sesuai bidang tugasnya.
2. Mewujudkan peningkatan jaringan komunikasi dan informatika.
3. Mewujudkan peningkatan pelayanan publik.
4. Menjadikan teknologi dan sistem informasi sebagai alat dalam mendukung pengambilan keputusan dan kebijakan yang tepat.
5. Mewujudkan peningkatan kinerja aparatur dengan memanfaatkan teknologi dan sistem informasi.
6. Mempermudah proses koordinasi antar lembaga melalui pemanfaatan teknologi dan sistem informasi
7. Menjadikan teknologi dan sistem informasi dalam meningkatkan akuntabilitas.
8. Menjadikan teknologi dan sistem informasi dalam mendorong terjadinya transparansi pada semua lini.

BAB V

Perencanaan Strategis

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil analisis dalam bentuk formulasi perencanaan strategis. Bagian ini akan menjelaskan faktor-faktor penentu kesuksesan implementasi e-government, visi dan misi pengembangan TIK, tujuan dan sasaran pengembangan, hasil analisis untuk perencanaan strategis serta kebijakan e-government.

5.1. Faktor-Faktor Penentu Kesuksesan

5.1.1. Visi, objektif dan strategi

Rencana jangka panjang dengan visi dan strategi yang jelas sangat penting dalam implementasi e-government, singkatnya keberhasilan e-government membutuhkan :

1. Visi yang jelas dari pemimpin : Beberapa pimpinan yang belum memiliki pemahaman yang baik tentang teknologi informasi dan komunikasi, akibatnya para pemimpin tersebut belum dapat menghasilkan visi yang baik dari pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembangunan Kabupaten Maros
2. Dukungan yang kuat dari masyarakat : Dukungan yang kuat dari masyarakat, dukungan akan dapat diperoleh jika masyarakat memahami dengan baik dampak penerapan TIK tersebut, masyarakat juga akan mendukung jika masyarakat membutuhkan dan dapat memanfaatkan layanan yang terdapat dalam TIK tersebut. Sayangnya sampai saat ini Indonesia masih terkendala dengan masalah kesenjangan digital, artinya masih banyak masyarakat yang belum terjangkau dengan layanan TIK.

3. Penetapan agenda dimana pengembangan e-Government di Kabupaten Maros harus menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

5.1.2. Hukum dan Peraturan

Adalah penting untuk merancang waktu dan usaha yang cukup untuk perubahan legislatif yang mungkin diperlukan untuk mendukung implementasi proses yang baru.

Aturan hukum berikut ini perlu dirancang demi keberhasilan e-government :

1. Hukum privasi dan isu terkait
2. Hukum terkait perubahan proses bisnis dan sistem informasi
3. Hukum terkait arsitektur teknologi informasi pemerintahan dan pendirian pusat pengembangan TIK terintegrasi

5.1.3. Struktur Organisasi

Restrukturisasi organisasi cukup berpengaruh untuk kesuksesan pengembangan TIK. Perubahan dalam struktur organisasi perlu direncanakan dengan matang dan diimplementasikan dengan sistematis.

Hal-hal penting yang mempengaruhi perubahan organisasi adalah sebagai berikut :

1. Kepemimpinan yang kuat dengan komitmen
2. Perencanaan manajemen TIK dan manajemen perubahan
3. Persiapan anggaran dan pelaksanaan anggaran
4. Koordinasi dan kolaborasi
5. Pemantuan dan pengukuran kinerja
6. Kemitraan pemerintah-sektor swasta-masyarakat

Restrukturisasi organisasi pada pemerintahan bukanlah hal mudah, dibutuhkan kesungguhan dan kebesaran hati dari pemerintah beserta jajarannya. Beberapa resiko

yang muncul adalah hilangnya sebuah fungsi atau struktur dan jabatan kerja tertentu karena berubahnya proses bisnis dan orientasi layanan yang ada. Resistansi yang muncul dari dalam itu sendiri dapat menjadi faktor kegagalannya, pimpinan semestinya mampu memberikan motivasi positif pada staf nya yang selama ini selalu berada di zona aman dan nyaman namun sekarang didorong untuk berubah dimana tidak ada satupun jaminan bahwa perubahan ini akan menjadi lebih nyaman atau tidak.

5.1.4. Proses Bisnis

Cara mengerjakan bisnis yang sedang berlangsung saat ini bukanlah langkah yang paling tepat atau efektif. Salah satu alat melakukan inovasi proses bisnis adalah *Business Process Reengineering (BPR)*. Kendala yang perlu disikapi dengan bijak adalah perilaku kerja yang sudah dijiwai oleh aparatur pemerintahan, perubahan proses bisnis akan menuntut aparatur pemerintahan untuk beradaptasi dengan sistem yang baru, jika aparatur pemerintahan tidak siap untuk beradaptasi dengan sistem yang baru akan mengakibatkan sistem tidak dapat bekerja secara optimal.

5.1.5. Teknologi Informasi

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih teknologi dan vendor adalah :

1. Tingkatan dari teknologi aplikasi yang dibutuhkan
2. Infrastruktur jaringan
3. Interoperabilitas
4. Standarisasi
5. Kemampuan teknis dan SDM
6. Live Time Perangkat

Pemilihan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan saat ini dan prediksi kebutuhan 5 (lima) tahun kedepan akan datang sangat menentukan keberhasilan secara keseluruhan

karena peran infrastruktur sebagai fondasi utama yang harus kuat dalam pengembangan dan pemanfaatan TIK.

5.2. Visi dan Misi Pengembangan TIK

5.2.1. Visi

Mewujudkan Pemerintah Kabupaten Maros sebagai **Smart Government**.

5.2.2. Misi

1. Memperkuat tatakelola e-Government
2. Mengembangkan kemampuan SDM aparatur sesuai kompetensi dan bidang tugasnya dengan menjadikan TIK sebagai pendukung utama.
3. Mengembangkan infrastruktur TIK terpadu untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan layanan masyarakat
4. Mengembangkan sistem informasi terintegrasi yang sejalan dengan visi pembangunan daerah
5. Meningkatkan keterbukaan informasi publik

5.3. Tujuan dan Sasaran

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1. Memperkuat tatakelola e-government	1.1 Terimplementasikannya e-government menuju good governance	1.1.1 Melengkapi regulasi sinergi implementasi e-government terintegrasi	Jumlah regulasi dan SOP Persentase SKPD yang memanfaatkan TIK
	1.2 Optimasi pengorganisasian TIK Pemerintah Kabupaten Maros	1.2.1. Meningkatnya pengelolaan TIK	Persentase Perubahan Pengembangan kelembagaan TIK
	1.3 Terbangunnya jejaring pengembangan TIK	1.3.1. Jejaring internal 1.3.2. Jejaring eksternal	Jumlah Jejaring pengembangan TIK
	1.4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM pengembangan, pengelolaan dan	1.4.1. Meningkatnya SDM pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan TIK	Jumlah dan sebaran optimal SDM Pengembangan dan pengelolaan TIK di

	pemanfaatan TIK		semua SKPD
	1.5. Meningkatkan budaya birokrasi berbasis elektronik yang dilaksanakan oleh seluruh pimpinan dan pegawai pemda untuk membangun e-government	1.5.1. Berubahnya proses birokrasi manual ke elektronik	Jumlah aplikasi termanfaatkan sebagai hasil perubahan proses dari manual ke elektronik
	1.6. Peningkatan efisiensi disemua anggaran rutin pemeliharaan dan pengadaan TIK	1.6.1. Meningkatnya efisiensi anggaran pembangunan	Persentasi penurunan anggaran rutin terkait otomatisasi perkantoran
	1.7. Meningkatkan pelayanan masyarakat	1.6.1. Meningkatnya kecepatan pelayanan pada masyarakat	Waktu pelayanan
2. Mengembangkan kemampuan SDM aparatur sesuai kompetensi dan bidang tugasnya dengan menjadikan TIK sebagai pendukung utama.	2.1. Meningkatkan kemampuan SDM dalam memanfaatkan TIK di lingkungan kerjanya	2.1.1. setiap aparatur menjadikan TIK sebagai bagian penting dalam melaksanakan tupoksi	Literasi TIK aparatur
		2.1.2. setiap aparatur mendapatkan pelatihan yang terukur terkait pemanfaatan TIK	Jumlah pelatihan setiap aparat
	2.2. Mendorong setiap aparat untuk mengembangkan budaya kerja berbasis TIK	2.2.1 optimalisasi pemanfaatan TIK dengan mendorong aparatur bekerja berbasis TIK	Tumbuhnya budaya pertukaran informasi berbasis elektronik
3. Mengembangkan infrastruktur TIK untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan layanan masyarakat	3.1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan internet/intranet di pemerintahan	3.1.1. Meningkatnya kecepatan internet/intranet di pemerintahan	Kecepatan download/upload internet dan intranet Jumlah downtime per tahun
	3.2. Meningkatnya pemanfaatan internet/intranet untuk pemerintahan	3.2.1. Meningkatnya jenis pemanfaatan internet/intranet	Jumlah Jenis pemanfaatan internet/intranet

	3.3. Meningkatkan keamanan informasi	3.3.1. Pengamanan aset informasi pemerintah daerah 3.3.2. Kepedulian pegawai pemda pada isu keamanan informasi	Penurunan kejadian malware Jumlah kehilangan data
	3.4. Meningkatkan fasilitasi pemanfaatan internet di masyarakat	3.4.1. Meningkatnya pengetahuan masyarakat untuk pemanfaatan internet	Jumlah Hotspot Pemda di Lokasi Umum Jumlah komunitas TIK Jumlah aktifitas kelompok masyarakat pemanfaatan TIK berbasis wilayah
4. Mengembangkan sistem informasi terintegrasi yang sejalan dengan visi pembangunan daerah	4.1. Meningkatkan pemanfaatan sistem informasi/aplikasi dalam pemerintahan dan pelayanan publik	4.1.1. Meningkatnya pemanfaatan aplikasi 3.1.2. Meningkatnya jumlah layanan pemerintah berbasis elektronik	Jenis birokrasi/layanan pemerintah yang menggunakan aplikasi/sistem informasi
	4.2. Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan data elektronik pemerintah yang terintegrasi	4.2.1. Meningkatnya pemanfaatan pusat data	Jenis data yang dimanfaatkan bersama
	4.3. Meningkatkan pemanfaatan sistem informasi bagi usaha kecil dan menengah yang terintegrasi dengan layanan pemerintahan	4.3.1. Meningkatnya transaksi elektronik untuk usaha kecil dan menengah	Jumlah aplikasi layanan usaha Jumlah transaksi elektronik
5. Meningkatkan keterbukaan informasi publik yang menggunakan media internet	5.1. Meningkatkan penyediaan dan penyebaran informasi pembangunan	5.1.1. Meningkatnya frekuensi masyarakat yang mengakses informasi pembangunan	Jumlah permohonan data/informasi kepada pemerintah daerah
	5.2. Meningkatkan pemantauan pemanfaatan TIK di masyarakat/dunia usaha	5.2.1. Meningkatnya internet sehat 5.2.2. Meningkatnya peran TIK untuk pemanfaatannya di dunia usaha dan layanan masyarakat	Jumlah hits pemanfaatan situs pemerintah Kabupaten Maros
	5.3. Meningkatkan peran	5.3.1. Meningkatnya	Jumlah pengaduan dan

	serta masyarakat dalam pembangunan	komunikasi masyarakat dengan pemerintah dan wakil rakyat	usulan warga melalui web, media sosial dan SMS gateway
--	------------------------------------	--	--

Untuk mencapai sasaran yang yang dimaksud dalam tabel diatas, maka perlu dikaji dan ditentukan kebijakan apa saja yang diperlukan melalui analisis SWOT, serta informasi lain yang memungkinkan untuk masuk dalam analisis kebutuhan ini. Dari hasil kajian kebijakan, nantinya akan di uraikan kegiatan beserta uraian output, input serta indikator capaian kinerja kegiatan.

5.4. Analisis SWOT untuk Perencanaan Strategis

Kekuatan	Peluang	Strategi S-O
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan daerah memiliki komitmen yang kuat dalam pengembangan pemerintahan berbasis TIK 2. Adanya regulasi terkait kebijakan TIK 3. Sudah ada SKPD Kominfo 4. Memiliki 2% SDM yang berlatar belakang pendidikan TIK, bai formal maupun informal ditambah dengan SDM yang berpengetahuan dan wawasan TIK meskipun tidak berlatar belakang pendidikan TIK 5. Sudah memiliki banyak aplikasi e-Government, baik yang dibangun Kominfo maupun SKPD lain 6. Sudah tersedia akses jaringan internet ke seluruh SKPD sampai dengan kelurahan 7. Adanya peluang untuk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tuntutan kinerja aparat untuk layanan masyarakat yang baik 2. Persaingan yang baik antar pemerintah daerah dalam meraih penghargaan nasional 3. Peningkatan kesejahteraan aparat apabila kinerjanya baik yang ditandai dengan indikator kepuasan 4. masyarakat terhadap layanan pemerintah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 5. Peningkatan peran egovernment dalam pembangunan daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manfaatkan pimpinan yang peduli dengan e-Gov untuk meningkatkan peran TIK pada proses birokrasi dan mendorong tercapainya <i>good governance</i> 2. Optimalisasi kewenangan SKPD Kominfo untuk melengkapi berbagai regulasi dan SOP untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan TIK yang berlaku untuk semua unit kerja 3. Adanya kebijakan pengarah dari pimpinan daerah, serta alat kontrol dan monitoring untuk implementasi e-govt 4. Restrukturisasi Organisasi untuk optimasi fungsi pengembangan dan pengelolaan TIK

<p>membangun datacenter sendiri</p> <p>8. Memiliki pengetahuan yang memadai untuk menyusun perencanaan e-govt yang komprehensif</p> <p>9. Pernah memperoleh beberapa award terkait pemanfaatan TIK</p>		<p>5. Peningkatan kerjasama dengan instansi pusat, sesama pemerintah daerah, konsultan profesional dan pihak ketiga untuk pengembangan e-Govt</p>
	<p>Tantangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pemahaman kepada seluruh stakeholder, pimpinan daerah serta karyawan tentang peran strategis e-Government yang sejalan dengan pembangunan daerah 2. Banyaknya contoh kasus kegiatan pengembangan TIK yang tidak sejalan dengan tujuan e-Government 3. Kondisi alam (topografi dan cuaca) yang sulit dipasang perangkat transmisi data 4. Perkembangan TI yang sangat cepat serta dinamika politik dan kemasayarakatan yang harus terakomodasi dalam 	<p>Strategi S-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi pengadaan dan pemanfaatan SDM TIK untuk pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan TIK diseluruh SKPD 2. Peningkatan jumlah dan kapabilitas SDM TIK untuk selalu mengikuti perkembangan Trend Teknologi Informasi terbaru 3. Koordinasi antar SKPD untuk pengembangan aplikasi e-Government dan infrastruktur TIK 4. Koordinasi dengan SKPD pengelola infrastruktur, untuk pelaksanaan instalasi dan pemeliharaan jaringan TIK 5. Perlunya dibuat

	perencanaan sistem	perencanaan pengembangan e-gov yang komprehensif dan berkesinambungan yang 6. disepakati oleh seluruh SKPD dan disetujui oleh pimpinan daerah
Kelemahan	Peluang	Strategi W-O
<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya sinergi antar SKPD untuk membangun e-Government 2. Belum banyak regulasi kebijakan untuk pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan e-Government yang menjangkau ke seluruh sistem pemerintah daerah 3. SDM praktisi TIK masih belum merata dan dioptimalkan untuk pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan TIK 4. Pengembangan aplikasi dan pengelolaan data masih belum terintegrasi 5. Belum memiliki perangkat untuk memastikan ketersediaan akan kebutuhan akses jaringan yang sudah terpasang 6. Belum memiliki datacenter/data recovery center serta sistem pengamanan informasi yang memadai 7. Belum adanya perencanaan induk dan detailnya untuk pengelolaan e- 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan tuntutan kinerja aparat untuk layanan masyarakat yang baik 2. Persaingan yang baik antar pemerintah daerah dalam meraih penghargaan nasional 3. Peningkatan kesejahteraan aparat apabila kinerjanya baik yang ditandai dengan indikator kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah dan peningkatan kesejahteraan 4. Peningkatan peran egovernment dalam pembangunan daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan aplikasi e-Government terintegrasi dalam bentuk sistem informasi manajemen, 2. sistem informasi eksekutif dan sistem informasi bantuan pengambilan keputusan untuk peningkatan kinerja aparat pemda, pengembangan dunia usaha dan layanan masyarakat 3. Pengembangan website Pemda yang terintegrasi dengan beberapa aplikasi sistem pelaporan dan layanan masyarakat 4. Bersama seluruh SDM penyelenggaraan TIK untuk meraih penghargaan nasional bidang e-Government 5. Pengembangan standar data, aplikasi dan perangkat TIK
	Tantangan	Strategi W-T
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahamkan kepada seluruh stakeholder, pimpinan daerah serta karyawan tentang peran strategis e-Government yang sejalan dengan pembangunan 2. Banyaknya kasus kegiatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan infrastruktur TIK yang optimal untuk memberikan jaminan akses jaringan layanan TIK pada aparaturnya Pemda di seluruh SKPD dan layanan masyarakat

<p>Government yang komprehensif yang bisa dijadikan acuan untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan perencanaan lainnya</p> <p>8. Website yang ada belum terintegrasi dengan aplikasi-govt</p>	<p>pengembangan TIK yang tidak sejalan dengan tujuan e- Government</p> <p>3. Kondisi alam (topografi dan cuaca) yang sulit dipasang perangkat transmisi data</p> <p>4. Perkembangan TI yang sangat cepat serta dinamika politik dan kemasyarakatan yang harus terakomodasi dalam perencanaan sistem</p>	<p>2. Koordinasi antar SKPD untuk sistem pengamanan informasi</p> <p>3. Sosialisasi pemahaman kepada seluruh stakeholder, aparat pemerintah daerah serta masyarakat untuk semakin meningkatkan pemanfaatan TIK.</p> <p>4. Melengkapi investasi infrastruktur TIK untuk menjamin keberlangsungan sistem dan meningkatkan</p> <p>5. sistem keamanan informasi</p>
--	---	---

5.5. Analisis Strategi dan Kebijakan

Berikut strategi penyusunan tahapan implementasi :

1. Pematapan postur kebijakan dan kelembagaan akan fokus dilaksanakan pada tahun pertama dan kedua perencanaan induk ini (2016), di tahun ke tiga hingga akhir tahun ke lima hanya tinggal review, dan penambahan SOP seperlunya, sedangkan untuk SDM lebih mengikuti prosedur umum.
2. Pematapan infrastruktur hingga tercapai kondisi ideal akan dilaksanakan selama 3 tahun pertama dan 2 tahun berikutnya dan seterusnya tinggal pemeliharaan dan penggantian perangkat yang sudah waktunya diganti berdasarkan umur efektif dan tingkat kerusakannya
3. Pengembangan Infostruktur (aplikasi e-Government) pada 2 tahun pertama akan dilakukan pematangan arsitektur sistem terintegrasi, bisnis proses reengineering pada seluruh birokrasi, sosialisasi dan penyelenggaraan proyek-proyek contoh, pada 3 tahun berikutnya dilakukan kegiatan pengembangan sistem secara masif yang melibatkan seluruh SKPD

Perencanaan Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran untuk menyusun program dan kegiatan pengembangan e-Government pemerintah Kabupaten Maros selama 5 tahun yang akan dimulai dari tahun 2016 sampai dengan 2020.

Tujuan	Sasaran	Strategi
Terimplementasikannya e-government menuju <i>good governance</i>	Melengkapi regulasi sinergi implementasi e-government terintegrasi	S/O – 1, S/O – 2
Optimasi pengorganisasian TIK	Meningkatnya pengelolaan TIK	S/O – 3, S/O – 4
Terbangunnya jejaring pengembangan TIK	Jejaring pengembangan dan pengelolaan internal Jejaring pendampingan pengembangan dan pengelolaan eksternal	S/O – 3, S/O – 5
Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan TIK	Meningkatnya SDM pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan TIK	S/T – 1, S/T – 2
Meningkatkan budaya birokrasi berbasis elektronik dengan peran serta seluruh jajaran pemda untuk membangun e-Government	Berubahnya proses birokrasi manual ke elektronik Meningkatnya efisiensi anggaran pembangunan	S/O – 2, S/T – 2, W/O – 1, W/O – 2, W/O – 3, W/O – 4
Meningkatkan pelayanan masyarakat	Meningkatnya kecepatan pelayanan pada masyarakat	W/O – 1, W/O – 4
Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan internet/ intranet	Meningkatnya kecepatan internet/intranet di pemerintahan	W/O – 1, W/O – 4
Meningkatnya pemanfaatan internet / intranet untuk pemerintahan	Meningkatnya jenis pemanfaatan internet/intranet	W/O – 3, W/O – 4
Meningkatkan keamanan informasi (<i>Confidentiality Integrity Availibilty</i>)	Pengamanan aset informasi pemerintah daerah Kepedulian pegawai pada isu keamanan informasi	W/T – 2, W/T – 4
Meningkatkan fasilitasi pemanfaatan internet di masyarakat	Meningkatnya pengetahuan masyarakat untuk pemanfaatan internet	W/O – 1, W/O – 2, W/O – 4
Meningkatkan pemanfaatan sistem informasi/aplikasi dalam pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya pemanfaatan aplikasi Meningkatnya jumlah layanan pemerintah berbasis elektronik	W/O – 1, W/O – 2, W/O – 3, W/O – 4

Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan data elektronik pemerintah yang terintegrasi	Meningkatnya pemanfaatan pusat data	W/O – 6
Meningkatkan pemanfaatan sistem informasi bagi usaha kecil dan menengah yang terintegrasi dengan layanan pemerintahan	Meningkatnya transaksi elektronik untuk usaha kecil dan menengah	W/O – 3
Meningkatkan penyediaan dan penyebaran informasi pembangunan	Meningkatnya frekuensi masyarakat yang mengakses informasi pembangunan	W/O – 4
Meningkatkan pemantauan pemanfaatan TIK di masyarakat/ dunia usaha	Meningkatnya internet sehat Meningkatnya peran TIK untuk pemanfaatannya di dunia usaha dan layanan masyarakat	W/O – 3, W/O – 4
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah	Meningkatnya komunikasi masyarakat dengan pemerintah dan wakil rakyat	W/O – 1, W/O – 4

5.6. Kebijakan e-Government

5.6.1. Dimensi Kebijakan

- 1) Mempercepat penyusunan kelengkapan regulasi terkait pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan e-Government/TIK Pemerintah Kabupaten Maros
- 2) Mempercepat penerapan pengembangan e-government dalam birokrasi dengan mendorong perubahan proses birokrasi dan budaya kerja berbasis elektronik
- 3) Membangun dan memperkuat standardisasi pendelegasian tugas dan kewenangan pengembangan TIK kepada seluruh SKPD sebagai salah satu upaya menuju efektifitas dan efisiensi pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan TIK di Pemda Maros
- 4) Melakukan sosialisasi, kontrol dan monitoring atas kebijakan strategis yang sah untuk diimplementasikan, untuk memastikan bahwa kebijakan telah dilaksanakan dengan baik di seluruh SKPD.

5.6.2. Dimensi Kelembagaan

- 1) Pembentukan organisasi fungsional CIO / Dewan TIK Daerah dipimpin oleh bupati atau minimal kepala SKPD eselon 2 yang kompeten untuk membuat kebijakan TIK
- 2) Memperkuat peran lembaga pengelola Kominfo yang secara khusus dan mandiri dalam pengelolaan e-Government untuk memudahkan koordinasi dengan SKPD lainnya dalam pengelolaan TIK
- 3) Peningkatan kapabilitas SDM di bidang TIK baik SKPD yang menangani kominfo maupun SKPD lainnya
- 4) Pengadaan dan pendistribusian SDM terkait TIK dikoordinasikan dengan SKPD terkait Kominfo : jumlah, kualifikasi, pendidikan
- 5) Kebijakan legalitas pengelola TIK di SKPD
- 6) Perlunya pendampingan untuk pengembangan pengelolaan TIK
- 7) Pembentukan fungsi *Helpdesk* dan monitoring jaringan SKPD baik jaringan eksternal maupun internal dilakukan secara cepat.

5.6.3. Dimensi Infrastruktur

- 1) Percepatan dan perluasan penyediaan jaringan *backbone* menggunakan *Fiber Optic* yang menjangkau seluruh SKPD dan jaringan distribusi layanan masyarakat sampai dengan tingkat kelurahan/desa/puskesmas/sekolah
- 2) Percepatan pengembangan dan pengelolaan *Datacenter* dan *Datarecovery* yang baik untuk menjamin *availability* dan peningkatan keamanan informasi
- 3) Pemanfaatan intranet untuk komunikasi antar SKPD
- 4) Adanya kebijakan standar pengelolaan infrastruktur TIK di SKPD
- 5) Adanya kebijakan manajemen *bandwidth*, *Public Internet Protocol (IP)* dan pemanfaatan akses internet untuk seluruh SKPD

5.6.4. Dimensi Aplikasi

- 1) Pengembangan kepemilikan, pemanfaatan data/informasi dan aplikasi e-Government yang terintegrasi dalam kerangka interoperabilitas
- 2) Untuk pengelolaan aset data dan informasi di Pemda Maros, maka perlu kebijakan
sentralisasi data dan informasi yang dihasilkan dari pemrosesan data di SKPD pada
datacenter SKPD kominfo
- 3) Setiap SKPD memiliki sistem informasi baik untuk layanan masyarakat (G2C), dunia usaha (G2B) maupun layanan internal (G2E), sesuai dengan prioritas kebutuhan secara bertahap
- 4) Perlunya standardisasi metadata untuk pengembangan aplikasi dan pengelolaan data tunggal dalam rangka interoperabilitas
- 5) Kebijakan *Open Source Software* digunakan untuk pengembangan aplikasi dan Operating system server, sedangkan untuk *client/desktop* menggunakan software Legal

5.6.5. Dimensi Perencanaan

- 1) Penetapan dokumen Rencana Pengembangan e-Government ini digunakan sebagai bahan penyusunan RPJMD dan renstra SKPD terkait pengembangan TIK
- 2) Penyusunan dokumen *action plan* untuk setiap kegiatan TIK yang berdampak luas
terhadap kinerja SKPD
- 3) Segera disusun *Business Continuity Plan* untuk layanan infrastruktur TIK
- 4) Diseminasi pengembangan dan pemanfaatan e-Government kepada level eksekutif
- 5) Adanya rekomendasi optimalisasi anggaran penyelenggaraan TIK untuk seluruh SKPD dari SKPD Kominfo.

BAB VI

Program, Kegiatan dan Rekomendasi

Pada bagian ini akan dilakukan penetapan skala prioritas pada sektor kebijakan, program, dan kegiatan. Selanjutnya disusun tahapan implementasi sesuai skala prioritas yang telah ditentukan. Kemudian disusun berbagai rekomendasi yaitu rekomendasi kebijakan, rekomendasi kelembagaan, rekomendasi perencanaan, rekomendasi aplikasi, hingga rekomendasi sarana TIK.

6.1. Penetapan Skala Prioritas

Skala prioritas implementasi berurutan dari nomor satu (1) dan seterusnya, terpisah dalam dimensi pengembangan e-Government.

No	Kebijakan	Program	Kegiatan	Output	Outcome
A. Dimensi Kebijakan					
1.	Penetapan regulasi terkait pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan e-government/TIK terintegrasi	Program Pengembangan Kelembagaan TIK	Penyusunan regulasi pelaksanaan e-Government	Peraturan Bupati	Panduan hukum impelemntasi e-Government
			Penyusunan regulasi rencana Induk e-Government	Peraturan Bupati	Panduan teknis impelemntasi e-Government
			Penyusunan regulasi metadata dan interoperabilitas data	Peraturan Bupati	Panduan teknis hukum dan teknis standarisasi data elektronik pemerintah daerah
			Penyusunan regulasi	Peraturan Bupati	Panduan teknis hukum dan

			pengembangan dan pemanfaatan sarana TIK terpadu		teknis pengembangan dan pemanfaatan sarana TIK pemerintah daerah
			Penyusunan regulasi pengembangan dan pemanfaatan prasarana TIK terpadu	Peraturan Bupati	Panduan teknis hukum dan teknis pengembangan dan pemanfaatan prasarana TIK
			Penyusunan regulasi pengelolaan aset informasi daerah	Peraturan Bupati	Panduan teknis hukum dan teknis pengelolaan aset informasi daerah pemerintah
			Penyusunan SOP Pengelolaan Aplikasi dan Web	Peraturan Bupati	Panduan Teknis pengelolaan Website dan subdomain pemerintah daerah
			Penyusunan SOP Pengelolaan Sarana TIK	Peraturan Bupati	Panduan Teknis pengelolaan Sarana TIK pemerintah daerah
			Penyusunan SOP Pengelolaan Prasarana TIK	Peraturan Bupati	Panduan Teknis pengelolaan Prasarana TIK pemda
			Penyusunan kebijakan keamanan informasi	Peraturan Bupati	Panduan Hukum pengelolaan Keamanan Data/informasi pemerintah daerah

			Penyusunan SOP Keamanan Data	Peraturan Bupati	Panduan Teknis pengelolaan Keamanan Data Pemerintah daerah
			Penyusunan SOP Keamanan Jaringan	Peraturan Bupati	Panduan Teknis Keamanan Jaringan
			Penyusunan SOP <i>Incident Handling</i>	Peraturan Bupati	Panduan Teknis <i>Incident Handling</i>
			Penyusunan SOP Pengelolaan Data Center	Peraturan Bupati	Panduan Teknis Pengelolaan Data Center
2	Pemanfaatan TIK pada proses birokrasi	Program Pengembangan Kelembagaan TIK	Penyusunan regulasi otomatisasi proses birokrasi (<i>Business Process Reengineering</i>)	Peraturan Bupati	Peningkatan kinerja PNS pemda dan peningkatan layanan Pemda pada masyarakat dan dunia usaha
3	Penetapan alat kontrol dan monitoring tingkat pemanfaatan TIK disemua unit kerja	Program Pengembangan Kelembagaan dan Kerjasama TIK	Audit TIK Penyusunan panduan monitoring dan evaluasi kinerja implementasi e-Government	Dokumen Audit Dokumen self assessment	Percepatan dan ketepatan implementasi e-Government
B. Dimensi Kelembagaan					
1	Perlunya pendampingan oleh pihak ketiga untuk pengembangan TIK dan beberapa operasional infrastruktur TIK	Program Pengembangan Kelembagaan dan Kerjasama TIK	Pendampingan tatakelola e-Government	Dokumen	
			Pendampingan Infrastruktur TIK	Dokumen	

			dan keamanan informasi		
			Pendampingan pengembangan aplikasi e-Government terintegrasi	Dokumen	
2	Pembentukan Organisasi Fungsional pada tataran strategis (CIO/Dewan TIK)	Program Pengembangan Kelembagaan dan Kerjasama Komunikasi dan Informatika	Pembentukan CIO/Dewan TIK	Organisasi fungsional	Pengaruh kebijakan TIK
3	Diseminasi pengembangan dan pemanfaatan e-Government kepada level eksekutif	Program Pengembangan Kelembagaan dan Kerjasama Komunikasi dan Informatika	Diseminasi pengembangan dan pemanfaatan e-Government kepada level eksekutif dan legislatif	Sosialisasi dan pendampingan	Pemahaman e-Government bagi <i>Top level management</i> secara berkelanjutan
4	Restrukturisasi SKPD Kominfo	Program Pengembangan Kelembagaan dan Kerjasama TIK	Restrukturisasi - Posisi eselon - Fungsi pengembangan TIK	Reorganisasi	Efisiensi dan efektifitas implementasi e-Government
5	Peningkatan kuantitas dan kualitas pengelola TIK di semua SKPD serta pendistribusiannya	Program Pengembangan Kelembagaan dan Kerjasama Komunikasi dan Informatika	Pengadaan SDM TIK Pelatihan TIK Distribusi SDM TIK Karir Kesejahteraan	Revitalisasi SDM	Efisiensi dan efektifitas implementasi e-Government
6	Pembentukan Jabatan Fungsional SDM pengelola TIK dan Kebijakan legalitas pengelola TIK di SKPD	Program Pengembangan Kelembagaan dan Kerjasama Komunikasi dan Informatika	Kebijakan Pembentukan Jabatan Fungsional SDM pengelola TIK dan Kebijakan legalitas pengelola TIK di	Peraturan Bupati	Efisiensi dan efektifitas implementasi e-Government

			SKPD		
7	Pembentukan fungsi kerja TIK sebagai <i>Helpdesk</i> dan monitoring jaringan SKPD	Program Pengembangan Kelembagaan dan Kerjasama TIK	Restrukturisasi SKPD Kominfo	Revitalisasi fungsi pengelola TIK	Efisiensi dan efektifitas implementasi e-Government
C. Dimensi Infrastruktur					
1	Pengelolaan infrastruktur TIK di SKPD	Pengelolaan Sarana dan Prasarana TIK	Kegiatan rutin pengadaan, pemeliharaan infrastruktur TIK	Pemeliharaan rutin	
2	Percepatan penyediaan jaringan <i>backbone</i> menggunakan <i>Fiber Optic</i> yang menjangkau seluruh SKPD sampai dengan tingkat kelurahan/desa puskesmas, sekolah	Pengembangan Sarana dan Prasarana TIK	Peningkatan layanan infrastruktur TIK untuk semua SKPD, kecamatan dan kelurahan/desa puskesmas, sekolah	Jaringan Backbone Fiber Optik Optimasi Jaringan distribusi ke kelurahan/desa dan puskesmas, sekolah	Peningkatan layanan infrastruktur TIK
3	Percepatan pengembangan dan pengelolaan Datacenter dan Data recovery	Pengembangan Sarana dan Prasarana TIK	Pembangunan data center dan pengadaan sewa data recovery oleh pihak ketiga	Peningkatan layanan infrastruktur internal	Peningkatan jaminan availability akses dan pengamanan informasi
4	Pengembangan intranet untuk komunikasi antar SKPD	Pengembangan Sarana dan Prasarana TIK	Pengadaan perangkat komunikasi berbasis intranet	Aplikasi komunikasi	Peningkatan kinerja PNS dan layanan masyarakat
5	Manajemen bandwidth, IP dan pemanfaatan akses internet untuk seluruh SKPD	Pengelolaan Sarana dan Prasarana TIK	Kegiatannya Mengacu pada kegiatan penyusunan SOP pengamanan informasi	Pelaksanaan manajemen keamanan informasi	Implementasi SOP pengamanan informasi
D. Dimensi Aplikasi					

1	Penyusunan Tatakelola data/ informasi yang terintegrasi dalam kerangka interoperabilitas	Pengembangan Aplikasi dan Data Eletronik	Pemetaan data SKPD dan koordinasi Pengelolaan Data	Peta dan inventarisasi Data Pemda	Pelaksanaan kebijakan data tunggal pemda
2	Sentralisasi data dan informasi yang dihasilkan dari pemrosesan data di SKPD	Pengembangan Aplikasi dan Data Eletronik	Backup Data SKPD dan koordinasi Pengelolaan Data	Pengamanan data pemda	Pelaksanaan kebijakan pengamanan data pemerintah
3	Standardisasi metadata untuk pengembangan aplikasi dan pengelolaan data tunggal dalam rangka interoperabilitas.	Pengembangan Aplikasi dan Data Eletronik	Penyusunan standar metadata SKPD dan koordinasi Pengelolaan Data	Inventarisasi standar metadata	Acuan penyusunan aplikasi pengolahan data pemerintah daerah
4	Pemanfaatan <i>Open Source Software</i> dan <i>Cloud Computing</i> digunakan untuk pengembangan aplikasi dan Operating system server, sedangkan untuk klien/desktop menggunakan software Legal	Pengembangan Aplikasi dan Data Eletronik	Pengadaan software proprietary untuk klien Migrasi aplikasi yang menggunakan Operating system proprietary menjadi opensource dan <i>Cloud Computing</i>	Jumlah software proprietary legal untuk terminal Jumlah aplikasi berbasis proprietary yang dimigrasikan Jumlah Aplikasi berbasis <i>Cloud Computing</i>	Legalitas kepemilikan aset milik negara mendukung peningkatan kemandirian bangsa
5	Pengembangan aplikasi e-government, setiap SKPD memiliki sistem informasi baik untuk layanan masyarakat (G2C), dunia usaha (G2B)	Pengembangan Aplikasi dan Data Eletronik	Pengembangan aplikasi e-Government klaster Administrasi dan manajemen umum Klaster keuangan	Aplikasi e-Government klaster Administrasi dan manajemen umum Klaster keuangan	Smart Government

	maupun layanan internal (G2E), sesuai dengan prioritas kebutuhan secara bertahap		Klaster pembangunan Klaster layanan masyarakat Klaster kepegawaian Klaster legislasi	Klaster pembangunan Klaster layanan masyarakat Klaster kepegawaian Klaster legislasi	
6	Redevelopment web Kab. Maros dan sub domain web SKPD yang terintegrasi	Pengembangan Aplikasi dan Data Elektronik	Pengembangan website	Pengembangan website	
E. Dimensi Perencanaan					
1	Penetapan dokumen Rencana Pengembangan e-Government melalui peraturan bupati	Program Pengembangan Kelembagaan dan Kerjasama Komunikasi dan Informatika	Koordinasi dan Komunikasi, Fokus Group Discussion, Sosialisasi, pengarahan pimpinan daerah (Sekda / Bupati)	Kesepakatan dan Draft Perbup tentang e-Government	Peningkatan koordinasi dan komunikasi antar SKPD tentang pengembangan e-government
2	Penyusunan dokumen <i>action plan</i> untuk setiap kegiatan TIK yang berdampak luas terhadap kinerja SKPD	Program Pengembangan Kelembagaan dan Kerjasama Komunikasi dan Informatika	Penyusunan dokumen <i>action plan</i> pengembangan datawarehouse dan standardisasi metadata	Dokumen <i>Action Plan</i> (Program Manual kegiatan)	Pedoman pelaksanaan kegiatan pengembangan e-government
3	Penyusunan <i>Business Continuity Plan</i> untuk layanan infrastruktur TIK	Program Pengembangan Kelembagaan dan Kerjasama Komunikasi dan Informatika	Penyusunan Dokumen <i>Business Continuity Plan</i> untuk layanan infrastruktur TIK	Dokumen <i>Business Continuity Plan</i> untuk layanan infrastruktur TIK	Pedoman pelaksanaan layanan infrastruktur TIK dan cara pelaksanaan apabila terjadi insiden
4	Rekomendasi optimalisasi anggaran penyelenggaraan TIK untuk seluruh	Program Pengembangan Kelembagaan dan Kerjasama Komunikasi	Penyusunan dokumen petunjuk teknis/standar biaya kegiatan	Dokumen petunjuk teknis/standar biaya kegiatan terkait	Pedoman belanja dan kegiatan terkait pengembangan e-government

	SKPD dari SKPD Kominfo.	dan Informatika	terkait pengembangan TIK	pengembangan TIK	
F. Dimensi Informasi					
1	Pengembangan kualitas dan kuantitas penyediaan informasi pembangunan melalui PPID	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Koordinasi dan konsolidasi penetapan dokumen standar informasi publik	Dokumen standar layanan informasi publik	Pedoman layanan informasi publik
2	Pembinaan pemanfaatan TIK oleh masyarakat dan dunia usaha	Program Pembinaan dan Pengendalian Telekomunikasi dan Informatika	Bimbingan teknis pada UMKM untuk memanfaatkan TIK	Bimbingan teknis	Peningkatan kewirausahaan berbasis elektronik
3	Pengembangan sistem <i>complaint resolution</i> pembangunan Kab. Maros	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Pembangunan aplikasi keluhan warga dan forum diskusi warga	Modul keluhan warga dan forum diskusi warga	Peningkatan peran serta warga dalam membangun Kab. Maros

6.2. Tahapan Implementasi

No	Program	2016	2017	2018	2019	2020
A. Dimensi Kebijakan						
1.	Penetapan regulasi terkait pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan e-government/TIK terintegrasi	√				
2.	Perubahan proses birokrasi dan budaya kerja dengan menyesuaikan seoptimal mungkin pemanfaatan TIK	√				
3.	Penetapan kebijakan sentralisasi dan desentralisasi kewenangan pengelolaan TIK	√				
4.	Penetapan alat kontrol dan monitoring tingkat pemanfaatan TIK disemua unit kerja	√				
5.	Penambahan kewenangan SKPD Kominfo untuk membuat rekomendasi optimalisasi anggaran penyelenggaraan TIK untuk seluruh SKPD	√				
B. Dimensi Kelembagaan						

1.	Perlunya kebijakan pendampingan oleh pihak ketiga untuk pengembangan TIK dan beberapa operasional infrastruktur TIK	√				
2.	Pembentukan Organisasi Fungsional pada tataran strategis (CIO/Dewan TIK Daerah)		√			
3.	Diseminasi pengembangan dan pemanfaatan e-government kepada level eksekutif		√			
4.	Restrukturisasi SKPD Kominfo	√				
5.	Peningkatan kuantitas dan kualitas pengelola TIK di semua SKPD serta pendistribusiannya yang efektif dan efisien. Jumlah, kualifikasi, dan pendidikan.		√			
6.	Pembentukan Jabatan Fungsional SDM pengelola TIK dan Kebijakan legalitas pengelola TIK di SKPD			√		
7.	Pembentukan fungsi kerja TIK sebagai Helpdesk dan monitoring jaringan SKPD baik eksternal maupun internal dilakukan secara cepat.	√				
C. Dimensi Infrastruktur						
1.	Adanya kebijakan standar pengelolaan infrastruktur TIK di SKPD	√				
2.	Percepatan penyediaan jaringan backbone menggunakan Fiber Optic yang menjangkau seluruh SKPD dan jaringan distribusi layanan masyarakat sampai dengan tingkat kelurahan/desa, puskesmas, dan sekolah	√	√	√	√	√
3.	Percepatan pengembangan dan pengelolaan Datacenter dan Data recovery yang baik untuk menjamin availability dan peningkatan keamanan informasi	√	√	√	√	√
4.	Pemanfaatan intranet untuk komunikasi antar SKPD	√	√	√	√	√
5.	Kebijakan manajemen bandwidth, IP dan pemanfaatan akses internet untuk seluruh SKPD	√				
D. Dimensi Aplikasi						
1.	Pengembangan kepemilikan, pemanfaatan data/informasi dan aplikasi e-government yang terintegrasi dalam kerangka interoperabilitas	√	√	√	√	√
2.	Kebijakan sentralisasi data dan informasi yang dihasilkan dari pemrosesan data di SKPD pada datacenter SKPD kominfo	√				
3.	Standardisasi metadata untuk pengembangan	√	√	√	√	√

	aplikasi dan pengelolaan data tunggal dalam rangka interoperabilitas					
4.	Kebijakan OpenSource Software dan Cloud Computing digunakan untuk pengembangan aplikasi berbasis layanan (service base)	√				
5.	Percepatan pengembangan aplikasi e-government dimana setiap SKPD memiliki sistem informasi baik untuk layanan masyarakat (G2C), dunia usaha (G2B) maupun layanan internal (G2E), sesuai dengan prioritas kebutuhan secara bertahap.	√	√	√	√	√
E. Dimensi Perencanaan						
1.	Penetapan dokumen Rencana Induk TIK digunakan sebagai bahan penyusunan RPJMD dan renstra SKPD terkait pengembangan TIK	√				
2.	Penyusunan dokumen <i>action plan</i> untuk setiap kegiatan TIK yang berdampak luas terhadap kinerja SKPD	√	√	√	√	√
3.	Penyusunan <i>Business Continuity Plan (BCP)</i> untuk layanan infrastruktur TIK			√	√	√
4.	Rekomendasi optimalisasi anggaran penyelenggaraan TIK untuk seluruh SKPD dari SKPD Kominfo.	√	√	√	√	√

6.3. Rekomendasi Kebijakan

Regulasi	Cakupan
Perbup - Kebijakan	Organisasi Pengelola e-Government yang berisi tentang Ketetapan Visi dan Misi, Bentuk Organisasi, Tupoksi, Indikator keberhasilan dan Honor
Perbup - Kebijakan	Pengembangan dan Implementasi aplikasi e-Government terintegrasi
Perbup - Kebijakan	Pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur terpadu
Perbup - Kebijakan	Standardisasi metadata
Perbup - Kebijakan	Pengelolaan aset informasi daerah
Perbup - Kebijakan	Pemanfaatan software legal (opensource, proprietary, Cloud Computing)
Perbup - Kebijakan	Pemanfaatan akses informasi
Perbup - SOP	Keamanan Informasi dan <i>Incident handling</i>
Perbup - SOP	Pengelolaan Datacenter
Perbup - SOP	Pengelolaan Jaringan LAN

6.4. Rekomendasi Kelembagaan

6.4.1. Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pemerintah Kab. Maros, memiliki berbagai organisasi perangkat daerah SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI). Dalam pemanfaatan TIK, antar SKPD akan terjadi kebutuhan yang sama antara satu SKPD dengan yang lain. Agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan teknis dan administrasinya, maka perlu diatur koordinasinya untuk bisa bersinergi dalam rangka memenuhi semua kebutuhan oleh masing-masing pihak. Para pihak dimaksud adalah sebagai berikut :

a. SKPD Pengelola TIK Pemerintah Kab. Maros, yaitu SKPD yang menangani urusan sebagai berikut:

1) Pengembangan Sistem Informasi dan Aplikasi, bidang ini menjalankan tugas sebagai berikut :

- Tatalaksana sistem yaitu menjalankan fungsi perencanaan e-Government secara komprehensif, perencanaan sistem aplikasi (SIM, EIS, DSS), penyusunan dokumen pengembangan system, sosialisasi system, pengukuran kinerja sistem
- Pengembangan aplikasi dan sistem terintegrasi menjalankan fungsi pengembangan aplikasi e-Government, migrasi sistem, pengamanan sistem, *help desk system*, pengendalian software proprietary, kebijakan pengembangan sistem, repository aplikasi e-government dan pengembangan aplikasi berbasis Cloud Computing
- Pengelolaan data menjalankan fungsi merencanakan aliran data seluruh proses birokrasi pemerintah daerah, inventarisasi pengamanan data, *backup/restore* data, berkoordinasi dengan SKPD untuk pemanfaatan data, perencanaan kebutuhan infrastruktur untuk penyimpanan dan transaksi data, kebijakan dan

pengelolaan aset informasi, dan pengembangan dan pengelolaan website pemerintah daerah

2) Pengelolaan sarana prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi, bidang ini menjalankan tugas sebagai berikut :

- Pengelolaan Datacenter dan Data recovery center menjalankan fungsi pengelolaan semua perangkat dan pengendalian persyaratan berjalannya data center dan data recovery center, pemeliharaan dan perawatan sistem, pengendalian pengadaan dan pemanfaatan datacenter, dan Monitoring system
- Pengelolaan Jaringan dan perangkat TIK menjalankan fungsi pengelolaan media transmisi data (wireline dan wireless), inventarisasi dan pengendalian perangkat TIK, *helpdesk* perawatan dan pemeliharaan perangkat TIK di SKPD, instalasi dan perawatan serta pengendalian jaringan dan media transmisinya, serta monitoring traffic jaringan
- Pengelolaan Keamanan Informasi menjalankan fungsi monitoring perilaku traffic, update anti malware, kebijakan keamanan informasi, penanganan kejadian keamanan informasi, dan koordinasi dengan institansi terkait pengamanan data milik negara

3) SKPD pemilik proses birokrasi yaitu SKPD selain SKPD pengelolaan TIK sebagai pemilik data/informasi dan proses birokasinya sebagai pengguna sarana dan prasarana TIK dan sistem informasi bertugas :

- Business processes re-engineering yaitu melakukan inventarisasi proses birokrasi terkini yang bisa diotimatisasikan menjadi sistem informasi
- Wali data yang berfungsi untuk melakukan akuisisi dan validasi data dasar, kebijakan data / informasi yang dihasilkan dari pemrosesan data melalui

sistem informasi, kebijakan pemanfaatan dan distribusi data, dan pengamanan dan pemeliharaan data

- Pengembangan sistem yang berfungsi menetapkan proses yang akan dijadikan modul sistem informasi, berkoordinasi dengan team teknis pengembangan sistem di SKPD Kominfo dalam hal pengelolaan data, memberikan penjelasan terkait proses bisnis (proses kerja sistem), Metodologi, Platform (bahasa pemrograman, database engine, sistem aplikasi, dll) yang ada di SKPD, aktor pelaksana, kelayakan dan ketersediaan anggaran, pengelolaan sistem, sarana dan prasarana yang tersedia (Server, jaringan, PC terminal, dll), serta ketersediaan sistem di pasaran. Pengembang sistem juga bertugas berkoordinasi dengan SKPD Kominfo untuk mendapatkan ijin kelayakannya tentang kebutuhan software proprietary dan aplikasi dari pemerintah pusat atau propinsi untuk dianalisis integrasi dengan system yang sudah ada serta berkoordinasi dengan SKPD lain dalam hal akuisisi data, pengelolaan dan tanggung jawab kepemilikannya.

4) Pemanfaatan infrastruktur TIK yang meliputi:

- Koordinasi setiap SKPD dengan SKPD Kominfo dalam hal kapasitas yang dibutuhkan, jumlah dan kualitas media komunikasi data, tingkat keamanan, sistem jaringan yang dibutuhkan, kompatibilitas hardware, spesifikasi teknis kebutuhan untuk pekerjaan, serta mekanisme pemeliharaan, pengoperasian dan pengendaliannya
- Setiap SKPD tidak seharusnya melaksanakan pengadaan, Perawatan dan pengendalian infrastruktur TIK sendiri apalagi tanpa berkoordinasi dengan SKPD Kominfo, hal ini dimaksudkan untuk pengendalian keamanan aset
- informasi pemerintah daerah. Namun apabila sudah ada sistem yang dibangun dari pusat untuk kepentingan nasional, maka sistem bisa diatur

sedemikian rupa agar tidak terjadi masalah teknis operasional akses informasi yang mengganggu kinerja seluruh jaringan pemerintah daerah. SKPD Kominfo yang memiliki kewenangan kebijakan untuk pengamanan seluruh sistem

- Bupati memiliki kewenangan penuh untuk mengendalikan dan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada di wilayahnya untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakatnya, untuk itu setiap SKPD wajib tunduk pada kebijakan bupati. Termasuk diantaranya adalah kepemilikan data/informasi sebagai aset informasi

6.4.2. SKPD Pengelola TIK

SKPD pengelola TIK di Kab. Maros saat ini adalah kantor Komunikasi dan Informatika yang dipimpin oleh Kepala kantor setingkat eselon III. Untuk mengoptimalkan tugas SKPD pengelolaan TIK maka SKPD Komunikasi dan Informatika selayaknya ada di setingkat eselon II. Pembagian bidang kerja dalam struktur organisasinya adalah sebagai berikut :

1. Kepala SKPD

2. Sekretaris

3. Bidang Aplikasi Telematika dan Pengelola Data Elektronik yang terdiri dari

1. seksi Tatalaksana sistem informasi
2. seksi pengembangan sistem informasi dan integrasi
3. seksi pengelolaan data dan aset informasi

4. Bidang Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika

1. Seksi Pengelolaan sarana dan prasarana pusat data
2. Seksi pengelolaan sarana dan prasarana jaringan TIK

3. Seksi Pengelolaan keamanan Informasi

5. Bidang Pos, Telekomunikasi dan Informasi Publik

1. Seksi Pengelolaan Informasi Publik

2. Seksi Urusan Pos

3. Seksi Urusan Telekomunikasi

6.4.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Reorientasi Tugas Pokok dan Fungsi

- Tupoksi lama : Mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis komunikasi dan informasi meliputi ketatausahaan, pengolahan data, penyiaran, jaringan dan komunikasi data, dan pengembangan sistem aplikasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar terbentuknya sistem jaringan komunikasi dan informasi di Kabupaten Maros.
- Tupoksi baru : Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan pemerintahan elektronik meliputi Perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informatika; pelaksanaan tugas bidang pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana e-government; pelaksanaan tugas bidang pengembangan dan pengelolaan Data dan aplikasi terintegrasi e-government; pelaksanaan tugas bidang pengelolaan Pos dan telekomunikasi serta diseminasi informasi publik; pelaksanaan tugas lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.4.4. Kebutuhan SDM

- a. Infrastruktur TIK : 6 orang, dengan penugasan khusus sbb:
 - Datacenter/Data recovery center : 2 orang dengan tugas instalasi, perawatan, monitoring fisik DC, perbaikan perangkat, help desk, kerjasama

pihak ketiga untuk pengelolaan DRC, Bandwidth dan IP serta kebijakan akses situs nasional/internasional.

- Jaringan MAN, WAN, LAN untuk melayani seluruh SKPD : 2 orang dengan tugas yaitu instalasi dan perawatan media transmisi, routing, cabling, data traffic monitoring, kerjasama dengan pihak ketiga dalam penyediaan local loop
- Sistem pengamanan informasi : 2 orang dengan tugas yaitu melakukan instalasi sistem pengamanan informasi, monitoring, insiden handling, kebijakan pengamanan informasi, sosialisasi awareness serta kerjasama dengan komunitas dan institusi jejaring pengamanan informasi nasional dan internasional.

b. Sistem Informasi : 6 orang, dengan penugasan khusus sbb:

- Data Manajemen : 2 orang dengan tugas untuk membangun dan memelihara Arsitektur data, pengumpulan data, pengelolaan data, distribusi dan pemanfaatan data
- Pengembangan aplikasi dan sistem integrasi : 2 orang dengan tugas untuk pengembangan aplikasi, pemeliharaan aplikasi, kebijakan pengembangan aplikasi dan backup sistem
- Tatalaksana system informasi : 2 orang dengan tugas untuk membangun proses bisnis, IT management, perencanaan TIK, dokumentasi system, tester aplikasi, implementasi dan sosialisasi, pengelolaan aplikasi top down, dan pengendalian software proprietary

6.5. Rekomendasi Perencanaan

- a. Perencanaan e-Government harus melibatkan seluruh komponen dalam pemerintah daerah melalui mekanisme yang telah ditetapkan melalui peraturan bupati

- b. Pelaksana tatakelola perencanaan e-government merupakan salah satu fungsi tatalaksana sistem informasi yang dilaksanakan oleh sebuah unit kerja dibawah SKPD Kominfo
- c. Secara berkala (jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang) harus dibuat perencanaan e-Government yang tertuang dalam dokumen resmi yang ditetapkan melalui peraturan bupati
- d. Setiap kandungan perencanaan TIK merupakan bagian dari perencanaan daerah

6.6.Rekomendasi Aplikasi e-Government

6.6.1. Status Aplikasi e-Government

Berdasarkan hasil kajian diatas, dapat dipetakan kebutuhan aplikasi untuk mendukung implementasi e-Government di Kabupaten Maros. Membangun e-Government bukan saja membangun infrastruktur komunikasi data dan informasi, tetapi juga berarti membangun infrastruktur sistem aplikasi, standarisasi meta data, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan prosedur, kebijakan dan peraturan.

No	Jenis Aplikasi	SKPD	SIM	SIE	DSS	Integrasi
A. Layanan Publik						
1.	Kependudukan	Dukcapil	L	L	BA	Simduk Nasional/Prop/Kota-Kab Semua sistem layanan publik
2.	Pajak dan Retribusi	Dispenda	L	L	L	Bank Sulselbar Sistem Dokumen Elektronik Pendaftaran dan Perijinan (Simtap)
3.	Pendaftaran dan Perijinan		L	L	BA	Katalog Hukum, Peraturan dan Perundang-undangan Bisnis dan Investasi Web
4.	Pengaduan Masyarakat	Humas	L	L	L	Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan
5.	Publikasi Info Umum dan Kepemerintahan (Web Site)	Kominfo	L	L	BA	Semua aplikasi e-Government yang membutuhkan publikasi informasi ke masyarakat
B. Administrasi dan Manajemen						
1.	E-Mail, surat	Kominfo	L	L	L	

	elektronik dan dokumentasi elektroniknya					
2.	Dokumen Elektronik (e-Filling)	Seluruh SKPD	BA	BA	BA	
C. Legislasi						
1.	Administrasi DPRD	Setwan	BA	BA	BA	
2.	Sistem pemilu daerah	KPUD	BA	BA	BA	
3.	Katalog Hukum	Bag. Hukum	L	L	BA	
D. Pembangunan						
1.	SIM Data Pembangunan	Bappeda	L	L	BA	Perencanaan pembangunan Daerah Pengadaan barang dan Jasa Pengelolaan Proyek Sistem Evaluasi dan Informasi Hasil Pembangunan
2.	Perencanaan pembangunan Daerah	Bappeda	BA	BA	BA	Sistem Informasi dan Manajemen Data Pembangunan Pengelolaan Proyek Sistem Evaluasi dan Informasi Hasil Pembangunan
3.	Pengadaan barang dan Jasa	LPSE	L	L	L	Pengelolaan dan Monitoring Proyek Perencanaan pembangunan Daerah
4.	Pengelolaan dan Monitoring Proyek	LPSE	L	L	L	Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Perencanaan pembangunan Daerah
5.	Sistem Evaluasi dan Informasi Hasil Pembangunan	Bappeda	BA	BA	BA	Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Sistem Anggaran
E. Keuangan						
1.	Sistem Anggaran	BPKD	L	L	L	Sistem Kas dan Perbendaharaan Sistem Akuntansi Daerah Perencanaan Pengelolaan dan Monitoring Proyek
2.	Kas dan Perbendaharaan	BPKD	L	L	L	Sistem Anggaran Sistem Akuntansi Daerah
3.	Akuntansi daerah	BPKD	L	L	L	Sistem Anggaran

						Sistem Kas dan Perbendaharaan
F. Kepegawaian						
1.	Mutasi dan Bangrir	BKDD	BL	BL	BL	Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Pemerintahan
2.	Absensi dan penggajian	BKDD	L	L	BL	Keuangan
3.	Penilaian Kinerja PNS	BKDD	BA	BA	BA	Sistem Absensi dan Penggajian
4.	Pendidikan dan Pelatihan	BKDD	L	BL	BL	Publikasi Informasi Umum dan Pemerintahan
G. Dinas Lembaga						
1.	Kepemerintahan		BA	BA	BA	Keuangan Pembangunan
	Pengelolaan Barang Daerah	BPKD	L	BL	BL	Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Sistem Anggaran Katalog Barang daerah
	Katalog Barang Daerah	Setiap SKPD	BA	BA	BA	Sistem Perencanaan Pembangunan daerah Pengelolaan Barang daerah
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Dispenda	L	L	BL	Perpajakan dan Retribusi Sistem Kas dan Perbendaharaan
	Pengelolaan Perusahaan Daerah	Perusda	BA	BA	BA	Modul Industri dan Perdagangan Perpajakan dan Retribusi
2.	Kewilayahan		BA	BA	BA	
	Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Bappeda BLHKP	BA	BA	BA	Modul Publikasi Informasi Umum dan Pemerintahan
	Potensi Daerah	DISPERINDAG DISBUDPAR BAPPEDA KPTSPM DISTAN SETDA	BA	BA	BA	Modul Publikasi Informasi Umum dan Pemerintahan Modul Katalog Hukum, Peraturan dan Perundang-undangan Modul Bisnis dan Investasi Modul Pendaftaran dan Perijinan
	Pertanian, Perikanan, Peternakan	DISTAN	BA	BA	BA	Modul Potensi Daerah
	Pariwisata	DISBUDPAR	BA	BA	BA	Blok Fungsi Dinas & Lembaga, Sub- Modul Potensi Daerah.

	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	KUKM	BA	BA	BA	Modul Potensi Daerah
3.	Kemasyarakatan					
	Kesehatan	DINKES	L	L	BA	SIAK dan Simduk Publikasi Informasi Umum dan Pemerintahan. Aplikasi Top Down Sosial dan Kemiskinan
	Pendidikan	DISDIK	BA	BA	BA	SIAK dan Simduk Publikasi Informasi Umum dan Pemerintahan Aplikasi Top Down Sosial dan Kemiskinan
	Ketenagakerjaan	Disosnakertrans	BA	BA	BA	SIAK dan SIMDUK Publikasi Informasi Umum dan Pemerintahan. Industri dan Perdagangan
	Industri dan Perdagangan	DISPERINDAG	BA	BA	BA	Publikasi Informasi Umum dan Pemerintahan Ketenagakerjaan
	Sosial dan Kemiskinan	Disosnakertrans	BA	BA	BA	Publikasi Informasi Umum dan Pemerintahan Ketenagakerjaan
	Pemerintahan	Desa/Kelurahan dan kecamatan	BA	BA	BA	SIAK dan Simduk Sosial dan Kemiskinan
4.	Sarana dan Prasarana					
	Transportasi	Dishhub	BA	BA	BA	Publikasi Informasi Umum dan Pemerintahan. Perencanaan pembangunan daerah
	Jalan, Jembatan dan drainase	PU	BA	BA	BA	Publikasi Informasi Umum dan Pemerintahan. Perencanaan pembangunan daerah
	Komunikasi (Kabel, BTS broadband, Hot Spot, dll)	Kominfo	BL	BL	BL	Publikasi Informasi Umum dan Pemerintahan. Perencanaan pembangunan daerah
	Sampah dan limbah	Tata Ruang	BA	BA	BA	Publikasi Informasi Umum dan Pemerintahan. Perencanaan pembangunan

						daerah
	Ruang terbuka hijau	Tata Ruang	BA	BA	BA	Publikasi Informasi Umum dan Pemerintahan. Perencanaan pembangunan daerah
	Bangunan dan gedung	Tata Ruang	BA	BA	BA	Publikasi Informasi Umum dan Pemerintahan. Perencanaan pembangunan daerah
	Perumahan dan Permukiman	Tata Ruang	BA	BA	BA	Publikasi Informasi Umum dan Pemerintahan. Perencanaan pembangunan daerah
	Penerangan Jalan Umum	Tata Ruang	BA	BA	BA	Publikasi Informasi Umum dan Pemerintahan. Perencanaan pembangunan daerah
	Air Bersih	PDAM	BA	BA	BA	Publikasi Informasi Umum dan Pemerintahan. Perencanaan pembangunan daerah Potensi daerah

Keterangan :

L : Sudah lengkap

BL : Belum lengkap dan perlu dilengkapi

BA : Belum ada dan perlu dibangun

TP : Tidak ada, tidak perlu dibangun

6.6.2. Spesifikasi website Pemda Maros dan sub domainnya

Website Pemda Maros akan dibangun ulang, perincian konten website dan spesifikasinya:

1. Konten

a. Profil Wilayah

- b. Profil Pemerintahan
 - c. Info kebijakan publik
 - d. Info perencanaan pembangunan daerah
 - e. Info capaian dan hasil pembangunan
 - f. Layanan pemerintah daerah
 - 1) Layanan Masyarakat
 - 2) Layanan Usaha
 - 3) Layanan Birokrasi online
 - g. Berita seputar aktivitas pemerintah
 - h. Media jejaring sosial warga
 - i. Iklan dan promosi usaha
2. Spesifikasi
- a. Tampilan mengacu pada konsep *Rich Internet Application (RIA)*
 - b. Platform System Opensource
 - c. Platform Pengembangan : CMS yang dibangun sendiri, tidak menggunakan template CMS atau platform manapun yang telah beredar umum
 - d. Beban per halaman maks. 100 KB
 - e. Laporan publik terintegrasi dengan aplikasi
 - f. Maroskab.go.id berfungsi sebagai gateway dan administatornya berfungsi sebagai integrator seluruh system
 - g. Setiap fitur merupakan subdomain dari maroskab.go.id dan systemnya terpisah satu sama lain yang hanya terhubung menggunakan hyperlink.
 - h. Setiap fitur bisa dikembangkan sendiri sendiri oleh masing masing administratornya
 - i. Setiap data dan informasi disimpan dan dikelola oleh SKPD sesuai tupoksinya, backup data dan pengemanan system dikelola oleh SKPD Kominfo.

3. Pengembang dan pengelola

- a. teknis aplikasi dan infrastruktur oleh Kominfo
- b. konten oleh setiap SKPD sesuai tupoksinya

6.6.3. Skala Prioritas Pengembangan Aplikasi

1. Pengembangan website resmi Pemda Maros didesain menjadi bersifat interaktif dengan pengelolaan aplikasinya diserahkan ke masing-masing SKPD
2. Pengembangan aplikasi e-government sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan berdasarkan Visi Pembangunan Kabupaten Maros :

Prioritas	Klaster	Perincian Modul	<	16	17	18	19	20	>
1	Kinerja PNS	e-mail	P						
		mutasi dan pengembangan karir		P					
		absensi dan penggajian	P						
		penilaian kinerja		P					
		Pendidikan dan latihan			P				
2	Kinerja Pemerintahan	Data Pembangunan							
		Website Pemda	P						
		e-Filling		P					
		Perencanaan Daerah	P						
		Pengadaan Barang Daerah	P						
		Pengelolaan dan Monitoring Proyek			P				
		Sistem evaluasi dan info hasil Pembangunan					P		
Sistem anggaran kas dan perbendaharaan akuntansi				P					

		daerah							
		Pengelolaan barang daerah					P		
		katalog barang daerah						P	
		pengelolaan pendapatan daerah			P				
		pengelolaan perusahaan daerah				P			
		pemerintahan desa/kelurahan dan kecamatan			P				
3	Layanan Masyarakat	Kependudukan							
		Pengaduan Masyarakat	P						
		tataruang dan lingkungan hidup				P			
		kesehatan		P					
		pendidikan		P					
		ketenaga kerjaan			P				
		sosial dan kemiskinan			P				
		transportasi				P			
		jalan jembatan dan drainase					P		
		komunikasi						P	
		sampah dan limbah						P	
		perumahan dan pemukiman						P	
		penerangan jalan umum					P		
		air bersih					P		
4	Layanan Bisnis	Pajak dan Retribusi							
		Pendaftaran dan perijinan	P						
		Bisnis dan Investasi		P					
		Administrasi DPRD			P				
		Sistem pemilu Daerah			P				
		Katalog Hukum	P						
		potensi daerah	P						
		pertanian perikanan peternakan				P			
		pariwisata		P					
		KUKM			P				
		Industri perdagangan					P		
		bangunan dan gedung						P	
Jumlah Modul Terbangun Setiap tahunnya			9	7	7	5	5	5	

6.6.4. Standardisasi Metadata

Tahapan Penyusunan standar Metadata :

Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
Membentuk kelompok	Mengidentifikasi	Mempelajari website	Menentukan elemen

<p>kerja penyusunan metadata untuk merencanakan, desain, pengembangan, mengevaluasi dan menerapkan metadata standrad dengan cara: Mengidentifikasi tujuan metadata yang akan digunakan: diskriptif, administrasi atau preservation Studi dan mengevaluasi standar metadata yang ada</p>	<p>kebutuhan stakeholder: Penyedia informasi dan layanan pemerintah Pengguna (warga negara, bisnis, dll) Kelompok kerja secara online Analisis umpan balik Identifikasi sumber daya informasi pemerintah yang akan dijelaskan oleh metadata: homepage Halaman menyediakan layanan online Pemerintah secara offline dan sebagainya</p>	<p>pemerintah daerah yang ada Mengidentifikasi masalah utama saat ini menurut: ✓ Perhatian dan persyaratan ✓ ketersediaan sumber daya pemerintah ✓ kebutuhan pengguna</p>	<p>metadata yang tepat: pilih mereka hanya dari standar metadata internasional pilih mereka dari standar metadata nasional yang ada mendefinisikan elemen baru untuk memenuhi kebutuhan mereka</p>
---	---	---	--

Model-model metadata :

a. UK eGMS Metadata Element Set (eGMS) version 3.1

- 1) Elemen: Definisi
- 2) Aksesibilitas: Menunjukkan ketersediaan dan kegunaan untuk kelompok tertentu sumber daya itu.
- 3) Penerima: Orang (atau orang) kepada siapa sumber daya ditujukan.
- 4) Agregasi: Tingkat atau posisi dalam hirarki sumber daya.
- 5) Pemirsa: Kategori pengguna untuk siapa sumber daya dimaksudkan.
- 6) Tanda tangan digital: Untuk diputuskan.
- 7) Pembuangan: retensi dan instruksi pembuangan untuk sumber daya.

- 8) Lokasi: Lokasi fisik dari sumber daya.
- 9) Amanat: Legislatif atau lainnya mandat di mana sumber daya diproduksi.
- 10) Pelestarian: Informasi untuk mendukung pelestarian jangka panjang sumber daya.
- 11) Status: Posisi atau keadaan sumber daya.

b. Model The Dublin Core Metadata Initiative (DCMI)

- 1) Elemen : Definisi
- 2) Judul : Nama yang diberikan untuk sumber daya .
- 3) Subyek : Topik dari isi dari sumber daya .
- 4) Keterangan : Sebuah rekening isi dari sumber daya .
- 5) Jenis : Sifat atau genre isi dari sumber daya tersebut .
- 6) Sumber : Sebuah referensi ke sumber daya dari mana sumber daya ini berasal .
- 7) Hubungan : Sebuah referensi ke sumber daya yang terkait .
- 8) Cakupan : Tingkat atau lingkup isi dari sumber daya .
- 9) Creator: Sebuah entitas terutama bertanggung jawab untuk membuat isi dari sumber daya.
- 10) Penerbit : Entitas bertanggung jawab untuk membuat sumber daya yang tersedia.
- 11) Kontributor : Sebuah badan yang bertanggung jawab untuk membuat kontribusi untuk isi
- 12) Sumber daya.
- 13) Hak : Informasi tentang hak dan diadakan di atas sumber daya tersebut .
- 14) Data: Data yang terkait dengan suatu peristiwa dalam siklus sumber daya.
- 15) Format : Manifestasi fisik atau digital sumber daya.
- 16) Identifier : Sebuah referensi ambigu ke sumber daya dalam konteks tertentu .
- 17) Bahasa: Bahasa dari isi intelektual sumber daya.

6.7.Rekomendasi Sarana Prasarana TIK

Rekomendasi Sarana Prasarana TIK ini berisi tentang indikator yang menjadi komponen utama sarana TIK yang akan dibangun. Kemudian Spesifikasi menggambarkan detail dari rencana pembangunan sarana. Kebijakan dan Strategi merupakan turunan dari kebutuhan sarana yang direncanakan. Sedangkan Hasil menggambarkan output kegiatan pembangunan sarana TIK.

No	Indikator	Spesifikasi	Kebijakan	Strategi	Hasil
1.	Datacenter	Ruang DC : raise floor, wall, cyling, pendingin, kontrol kelembaban, kontrol debu, smoke detector, pemadam, cabling	Ruang Green DC/DRC dengan standar TIA 942 Tier 1	Membangun Datacenter 1. Menentukan Luas Ruang yang dibutuhkan 2. Menentukan lokasi ruang yang tepat 3. Mengukur daya yang dibutuhkan 4. Mengatur pendinginan & kelembaban ruang 5. Lantai anti statis (raised Floor System) 6. Memilih Jenis Rack Server& Pengaturan Kabel 7. Pemadam kebakaran & System keamanan lainnya Pemanfaatan DRC milik pihak ketiga	Ruang DC ukuran P/L 10 M ² , tinggi 3,5 M, Raise Floor 50 Cm, dingin 22°C, pemadam, keteraturan kabel
		Server, storage, switch, router, Firewall / IPS	Efisiensi sumber daya perangkat dengan menggunakan teknologi terkini	Pengadaan Perangkat TI Instalasi berbasis cloud	Kesiapan instalasi
		Rack, Main Power, secondary Power, UPS, Grounding, power capacity, power network	Efisiensi sumber daya perangkat dengan menggunakan teknologi terkini	Pengadaan equipment Instalasi berbasis Green DC Memastikan grounding 0 Ohm Power PLN dan Genset	Kesiapan instalasi
		Monitoring logical security, phisical security	Jaminan SLA 99,9 %	Monitoring 24 x 7 Insident Handling	Down Time <22 jam/thn Response Time 1 jam
		Perawatan, penggantian alat dan ketersediaan	Perawatan Harian Kesiapan perangkat	Aktifitas monitoring harian Log Book Analisis	Down Time <22 jam/thn Response Time 1

		alat perawatan	pengganti	Perbaikan	jam
2.	Jaringan	Topologi dan cabling	WAN, MAN, LAN	Redundant Star Catatan alamat asal dan tujuan setiap kabel dan wireless Setiap kabel mempunyai label alamat asal dan tujuan	Down Time <22 jam/thn
		Backbone	Antar Kecamatan dan SKPD yang terlewati	Pengadaan dan instalasi media transmisi menggunakan Fiber Optic	Fiber Optic single Mode 10 core untuk kapasitas 10 Gbps
		Distribusi	Dari seluruh SKPD s/d ke desa/kelurahan	Pengadaan dan instalasi MAN : Wireless LAN : UTP/STP	Jaringan dengan kapasitas 1 Gbps
3.	Keamanan	Perangkat pengaman Fisik	Berbasis biometrik	Pengadaan perangkat : Finger print, CCTV, monitoring system Penjagaan personil keamanan	Zero Incident
		Perangkat pengamanan logic	Pengamanan sebelum ke network dan alokasi tertentu	Pengadaan dan instalasi Firewall Manajemen akses	Zero Incident
		Awareness	Peran serta setiap karyawan dalam pengamanan aset informasi	Penyelenggaraan Sosialisasi pemberian Reward/ punishment Pemberian petunjuk dan Regulasi Pengadaan Tools anti malware	Zero Incident
		Aplikasi	Berbasis Open Source dan Cloud Computing	Pengadaan Aplikasi, instalasi, monitoring, insident handling Koordinasi dgn komunitas dan jaringan keamanan nasional	Response Time < 1 jam Secured
		DRC management	Di berikan ke pihak ketiga yang memberikan jaminan kepuasan pelanggan	Analisis kebutuhan pengamanan dan backup DRC system Business Continuity Plan	Confidentiality Integrity Availability
		Risk / vulnerability management	Monitoring	Aktifitas monitoring Analisis kejadian Kebijakan keamanan	Response Time < 1 jam Secured
4.	Services	SLA	99,9 %	Perawatan dan Perbaikan perangkat dan system	Zero Incident
		Coverage	Seluruh SKPD, desa/kelurahan dan puskesmas	Instalasi infrastruktur Instalasi aplikasi e-Government	Availability
		Capacity	Kapasitas	Pengadaan perangkat	Availability

			terpakai adalah 70 % dari kapasitas terpasang	cadangan untuk perbaikan dan pengembangan Pengadaan bandwidth	
		Policy	Pemanfaatan TI, Akses, IP dan bandwidth	Pengelolaan optimal sumber daya TIK hanya untuk kegiatan terkait kantor serta layanan masyarakat	Optimasi sumber daya TIK
		Repository	Pengelola Aset Informasi	Pengelolaan data Pengelolaan aplikasi dan software	Jaminan keberlangsungan system
		Data management	Pengelola Data tunggal	Standardisasi data Pengumpulan data dan distribusi data	Jaminan integritas data pemerintah
		Datawarehouse	Sistem informasi eksekutif Sistem informasi pendukung pengambilan keputusan	Pengembangan aplikasi	e-government yang efektif
		Data Processing	Berfungsi sebagai Backup System	Back up system	Availability
		Aplikasi dasar	Web, e-Mail, VoIP dll	Identitas organisasi	Integritas pemerintah daerah
5.	Manajemen	Standar layanan	Menggunakan IT Infrastructure Library (ITIL)	Pemahaman system Pelaksanaan system Monev	
		SOP	Dilaksanakan secara terpadu	Pemahaman system Pelaksanaan system Monev	
		Audit TI	Dilaksanakan tiap tahun	Audit optimasi infrastruktur Audit pemanfaatan Aplikasi Audit tatakelola	
		SDM	Optimalisasi SDM	Pengadaan, penugasan, distribusi, karir, kesejahteraan	
6.	Akses	Bandwidth dan local loop	Optimasi kebutuhan dan pemanfaatannya	Pengadaan dan distribusi pemanfaatannya	

6.7.1. Jaringan Backbone

Rencana pengembangan jaringan Backbone mengacu pada kondisi infrastruktur yang sudah dibangun saat ini. Karena sebagian topografi Kabupaten Maros yang terdiri dari

pegunungan, maka daerah tersebut akan dibangun jaringan komputer dengan menggunakan teknologi radio. Pembangunan dilakukan hingga jaringan internet dapat menjangkau desa/kelurahan, sekolah dan puskesmas. Untuk daerah dengan topografi dataran maka diprioritaskan untuk membangun dengan teknologi fiber optic (FO) karena teknologi ini lebih memungkinkan kecepatan dan kestabilan akses data.

6.7.2. Sistem Pengamanan Data

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil analisis dengan menggunakan analisis SWOT berdasarkan fakta yang didapatkan di lapangan. Hasil analisis ini digunakan untuk menyusun formulasi strategi serta manajemen resiko dalam melakukan pencegahan serta penanganan kejadian terkait sistem pengamanan data.

Analisis SWOT Pengamanan Informasi

Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
----------------------------	-----------------------------

<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen dan dukungan Pimpinan dalam hal Keamanan Informasi 2. Telah ada regulasi tentang implementasi e-government : UU ITE dan Instruksi Presiden tentang Penyelenggaraan e-Government 3. Telah ada regulasi tentang keamanan informasi bagi penyelenggara pelayanan publik, penyelenggara sistem elektronik dan penyelenggara sistem transaksi elektronik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya tingkat pengetahuan dan kepedulian pegawai negeri sipil tentang keamanan informasi 2. Belum ada regulasi dan standar tentang keamanan informasi untuk manajemen resiko keamanan informasi pemerintah daerah 3. Masih banyaknya kerentanan keamanan informasi pada aplikasi layanan masyarakat baik pada sisi infrastruktur, tatakelola dan instalasinya
<p>Peluang (Opportunity)</p>	<p>Ancaman (Threat)</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pesatnya perkembangan teknologi keamanan informasi. 2. Adanya SNI 7512:2008 tentang Pengelolaan insiden keamanan informasi yang diadopsi dari ISO/IEC TR 18044:2004, Information Security Incident Management dan Adanya Standar ISO/IEC 27001: Information Security Management System 3. Adanya Kerja sama berupa koordinasi dengan multipihak untuk permasalahan keamanan informasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya insiden serangan keamanan informasi terhadap infrastruktur milik Pemerintah 2. Belum standarnya kesiapan pemerintah pusat dan daerah tentang status sistem pengamanan informasi 3. Kehilangan aset informasi pemerintah yang bernilai oleh karena bocornya informasi penting yang bersifat rahasia 4. Dampak pada terganggunya pelayanan publik yang berbasis elektronik 5. Turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

Ancaman serangan terhadap Infrastruktur nasional dapat berupa secara fisik dan non fisik. Infrastruktur nasional yang rentan terhadap serangan dapat disebut dengan critical infrastructure (infrastruktur kritis). Serangan keamanan sistem informasi yang bersifat tidak langsung, seperti; virus, worms, malware dan lain sebagainya dalam wujud kode-kode perangkat lunak yang disampaikan melalui jaringan internet nasional terhadap infrastruktur nasional akan berdampak seperti serangan keamanan secara fisik. Hal ini

disebabkan oleh karena informasi merupakan asset yang sangat berharga bagi pemerintahan sebuah Negara.

Untuk mengantisipasi adanya serangan keamanan system informasi, perlu ditingkatkan kesadaran akan keamanan informasi dan juga dibutuhkan adanya tata kelola keamanan system informasi yang baik di tingkat nasional. Tanpa adanya kesadaran dan tata kelola keamanan sistem informasi yang tepat sangat sulit bagi sebuah negara untuk mengantisipasi serangan-serangan keamanan informasi nasional. Organisasi dan tata kelola ini adalah sebagai wujud kepemimpinan yang akan memiliki peran penting untuk melakukan koordinasi antar lembaga terkait. Dalam organisasi tersebut, harus diisi oleh sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi dari berbagai bidang khususnya kemampuan teknis dibidang keamanan informasi dan juga kemampuan manajerial serta kepemimpinan (*leadership*) yang baik.

Perlu adanya suatu proses dan manajemen yang mengatur Keamanan Informasi. Prosedur dan pengelolaan yang efektif untuk menjaga keamanan informasi. Keamanan informasi membutuhkan pengelolaan terhadap nilai aset informasi, serta kerentanannya terhadap adanya berbagai ancaman. Pengelolaan aset informasi terhadap ancaman dan kerentanannya lazim disebut manajemen resiko. Metode manajemen resiko sebagai berikut :

- Metode Pengurangan Risiko – metode ini dilakukan ketika kemungkinan ancaman/kerentanan tinggi tetapi dampaknya rendah.
- Metode Penerimaan Risiko – metode ini dilakukan ketika kemungkinan ancaman/kerentanan rendah dan dampaknya kecil atau dapat diterima.
- Metode Pemindahan Risiko - Jika risiko sangat tinggi atau organisasi tidak mampu mempersiapkan kendali yang diperlukan, risiko dapat dipindahkan keluar dari organisasi.

- Metode Penghindaran Risiko - Jika ancaman dan kerentanan sangat mungkin terjadi dan dampaknya juga sangat tinggi, lebih baik menghindari risiko dengan misalnya melakukan alih daya perangkat pemrosesan data dan juga staf

Risiko keamanan informasi berbanding lurus dengan nilai aset informasi, ancaman dan kerentanan. Jadi, risiko dapat meningkat atau berkurang dengan cara memanipulasi besar atau kecilnya ancaman dan kerentanan yang mempengaruhi nilai aset informasi. Hal ini dapat dilakukan dengan manajemen risiko.

Resiko Permasalahan	Implementasi	
	Keamanan Fisik	Keamanan Logika
Internal : berupa ketidak sengajaan, ketidak tahuan, kenakalan, dan kejahatan terhadap pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan data/informasi	Regulasi SOP pengelolaan Infrastruktur TIK + Keamanan Datacenter : - Kunci biometrik - Kebersihan - Suhu dan kelembaban - Pemadam Kebakaran - Main Power dan cadangannya + Keamanan jaringan - Labelling - Kerapihan / keindahan - Kekuatan fisik perangkat	Regulasi SOP Pemanfaatan sumber daya TIK - Pemanfaatan Akses internet/ intranet - Pengelolaan IP - Password
Eksternal: berupa ketidak sengajaan, ketidak tahuan, kenakalan, kejahatan untuk melakukan akses logic dan fisik oleh pihak luar yang tidak berhak	+ Keamanan Datacenter - Aman dari binatang pengganggu - Gangguan alam + Keamanan Jaringan - Gangguan alam - Gangguan pencurian dan perusakan (sengaja / tidak sengaja) Pengadaan : Ruang datacenter standard Perangkat Routing : Firewall dan IDS	Keamanan sistem - Manajemen dan personil pelaksana Security operasional control (SOC)

6.7.3. Data Center/Data Recovery Center



Gambar 5. Contoh Data Center

Rekomendasi spesifikasi Data Center/Data Recovery Center Pemerintah Kabupaten Maros:

1. Data Recovery center dititipkan ke pihak ketiga yang mempunyai standar pengamanan informasi yang baik, lebih diutamakan yang sudah memiliki ISO 27001:2005 atau SS504 atau juga yang menggunakan standar itu meskipun belum bersertifikat
2. Ruangannya : 2.5 x 4 meter, tanpa jendela / dinding kaca yang mepet ke pinggir luar gedung
3. Jumlah rack minimal 3 : Rack keamanan dan storage, rack server dan rack distribusi
4. Pendingin ruangan, suhu ruangan dibawah 20 derajat celcius
5. Raise floor dan atap: apabila menggunakan bahan standar dan aman dari akses binatang (pengerat, serangga ataupun melata), maka sangat baik digunakan sebagai jalur kabel, tinggi raise floor sekitar 30 Cm.

6. Pintu berpengaman kunci biometrik
7. Setiap kabel mempunyai label alamat asal dan tujuan
8. Pemeliharaan berkala untuk setiap perangkat

BAB VII

Penutup

Rencana Induk e-Government Pemerintah Kabupaten Maros 2016 – 2020 ini merupakan buku induk akan tetapi bisa disesuaikan dengan kondisinya sejalan dengan perkembangan politik, kondisi sosial kemasyarakatan serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat. Sebaiknya dokumen ini ditinjau ulang setiap tahunnya oleh seluruh SKPD beserta kantor Kominfo sebagai leading sektornya.

Kemudian didalam dokumen ini terdapat isu-isu sensitif yang beresiko munculnya resistensi dari komponen pemerintah daerah yang terkurangi kenyamanannya dan terpaksa harus berubah sejalan dengan kebijakan otomatisasi perkantoran. Pengadaan perangkat komputer tidak serta merta menjadi solusi atas permasalahan peningkatan kinerja pemerintah, output dari pengadaan perangkat adalah berupa alat untuk pelaksanaan implementasi e-government sedangkan e-government itu sendiri merupakan sistem pemerintahan berbasis elektronik, pemahaman ini harus dimiliki oleh seluruh pengelola pemerintah kabupaten sehingga beban kerja implementasi e-government bukan hanya oleh SKPD Kominfo akan tetapi merupakan gerakan bersama seluruh SKPD yang dipimpin langsung oleh bupati untuk melaksanakannya. Kunci utama gerakan ini adalah perubahan paradigma dari kinerja berbasis manual menjadi kinerja berbasis elektronik.

Pada bagian cetak biru dan perencanaan tindak implementasi e-government telah disebutkan hasil dan cara mencapai hasil kegiatan pengembangan e-government ini, Namun seberapapun investasi dikucurkan untuk pengadaan teknologi informasi, tapi jika tidak didukung dengan SDM yang memadai serta kebijakan TIK yang masih lemah maka semua akan sia-sia saja karena perangkat TIK pastinya memiliki umur yang

terbatas. Pemeliharaan perangkat TIK tanpa ilmu yang memadai akan menambah permasalahannya dan melenceng dari tujuan e-government sendiri yaitu efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintah daerah.